

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI
TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA
JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun Oleh :

LINDA KRISNAWATI

F1115020

**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2017

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015

LINDA KRISNAWATI
F1115020

Tingkat pengangguran yang tinggi pada suatu daerah menunjukkan belum mampunya pemerintah mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Tingkat pengangguran di Jawa Tengah tahun 2011-2015 selalu mengalami penurunan tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah variabel makroekonomi (inflasi, UMK, PDRB) terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2011-2015. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS, Bank Indonesia, Bappenas dan lembaga lainnya berupa data tingkat pengangguran, inflasi, UMK, dan PDRB. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk data *panel*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi dan PDRB memiliki nilai tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Sedangkan variabel UMK memiliki nilai negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Saran penelitian ini adalah tinggi rendahnya tingkat pengangguran merupakan gambaran kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa memaksimalkan kinerja pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran.

Kata kunci : Pengangguran, Inflasi, UMK, PDRB

ABSTRACT

ANALYSIS OF MACROECONOMIC VARIABLES ON UNEMPLOYMENT IN THE DISTRICT / CITY CENTRAL JAVA IN 2011-2015

LINDA KRISNAWATI
F1115020

High unemployment rate in a region showing yet inability of the government achieve economic development goals. The unemployment rate in Central Java in 2011-2015 always has decreased but is still below the national average.

The main objective of this study was to determine and analyze the effect of the number of macroeconomic variables (inflation, UMK, GDP) to the unemployment rate in Central Java. Observations used in this study is the Central Java province during 2011-2015. Methods of data collection using secondary data published by BPS, Bank Indonesia, Bappenas and other institutions such as the data rate of unemployment, inflation, MSE, and the GDP. The analytical method used is multiple linear regression for *paneldata*.

Results from the study showed that the variables of inflation and the GDP have no significant value on the unemployment rate in Central Java. While variable UMK has a negative value and significant impact on the unemployment rate in Central Java. Suggestions of this study was high low unemployment rate is a picture of the government's performance in mencapai economic development purposes. Therefore, the government should be able to maximize performance on the factors that affect unemployment.

Keywords: Unemployment, Inflation, Minimum Wage, GDP

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI
TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA
JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015**

Diajukan Oleh:

LINDA KRISNAWATI

F1115020

Disetujui dan diterima oleh pembimbing

Pada tanggal, Juni 2017

Surakarta, Juni 2017

Pembimbing

Dr. Akhmad Daerobi M.S

NIP. 195703041986011002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP
PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA
JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015**

Diajukan Oleh:

LINDA KRISNAWATI

F1115020

Telah disetujui dan diterima baik oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program S1 Studi Ekonomi Pembangunan.

Surakarta, 20 Juli 2017

Tim Penguji Skripsi:

1. Lukman Hakim S.E. M.Si., Ph.D
NIP. 19680518 200312 1 002

Ketua

2. Dr. Guntur Riyanto M.Si
NIP. 19580927 198601 1 001

Sekretaris

3. Dr. Akhmad Daerobi M.S
NIP. 19570804 198601 1 002

Pembimbing

Diketahui oleh

Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan



Dr. Sri Aisyah Tri Rahayu, M.Si

NIP. 19680927 199702 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret :

Nama : Linda Krisnawati

NIM. : F1115020

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN (TRANSFER)

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH VARIABEL
MAKROEKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN
DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH TAHUN
2011-2015

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan/salinan/sanduran dari karya orang lain.

Apabila ternyata dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penarikan Ijazah dan pencabutan gelar sarjananya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 10 Juli 2017

Mahasiswa



LINDA KRISNAWATI
NIMF1115020

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

- 1) Hidup untuk Berjuang dan Menikmati Perjuangan**
- 2) Tidak terkalahkan dengan orang yang merendahkan, Tidak sejajar dengan orang yang memuji Karena hidupku adalah diriku**
- 3) Learning is Never Ending Adventure**

Karya ini saya persembahkan untuk :

Keluarga saya tercinta

Semua rekan-rekan FEB UNS

Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufik dan hidayah-NYA telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penuliskripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015”. Skripsi ini disusun guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Walaupun dalam penulisannya penulis banyak mengalami masalah, namun berkat motivasi dan semangat dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu hingga tersusunnya skripsi ini kepada :

1. Bapak,Ibu tercinta
2. Dr. Hunik Sri Runing S, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
3. Ibu Dr. Siti Aisyah Tri Rahayu, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Dr. Akhmad Daerobi M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan hingga tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sutanto M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu kelancaran aktivitas perkuliahan selama 2 tahun ini.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, semoga ilmu yang didapat penulis selama kuliah dapat menjadi berkah dan manfaat untuk masa depan.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Mas Ma'arif Ridho Setyawan yang selalu memotivasi dan memberi arahan hingga penelitian ini terselesaikan.
9. Seluruh teman-teman dari Ekonomi Pembangunan Transferangkatan 2015 untuk kebersamaannya selama 2 tahun.
10. Semua pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pelaksanaan penelitian dan penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga penulis menerima semua kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan tugas akhir ini.

Surakarta, 20 Juli 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN	9
D. MANFAAT	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. LANDASAN TEORI.....	11
1. BASIS TEORI.....	11
a. Teori Tenaga Kerja	11
b. Teori Pengangguran.....	13
c. Teori Upah	21
d. Teori Inflasi	25
e. Teori PDRB	32
f. Pengaruh Variabel independen terhadap dependen.....	33
2. PENELITIAN TERDAHULU	40

B. KERANGKA PEMIKIRAN	43
C. HIPOTESIS	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	46
B. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	46
C. JENIS DAN SUMBER DATA	47
D. METODE PENGUMPULAN DATA.....	48
E. METODE ANALISIS DATA	48
1. ANALISIS DATA PANEL.....	48
2. METODE DATA PANEL	49
a. Common Effect (CE)	49
b. Fixed Effect (FE)	49
c. Random Effect (RE)	49
3. PEMILIHAN MODEL.....	50
a. F Test (Chow Test)	50
b. Uji Hausman	51
c. Langrangge Multiplier (LM) Test.....	51
4. Penyembuhan Heteroskedastisitas	52
5. Model Analisis	52
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
A. DESKRIPTIF WILAYAH PENELITIAN	55
1. Keadaan Geografi.....	55
2. Kondisi Demografi	57
3. Jumlah Penduduk	57
4. Kondisi Ekonomi.....	58
5. Keadaam Administrasi/Pemerintah.....	58

B. DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN	59
1. Pengangguran	59
2. Inflasi.....	61
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota	64
4. Produk Domestik Regional Bruto	66
C. HASIL ANALISIS DATA.....	68
1. Pembentukan Model Regresi Data Panel	69
a. Hasil Regresi Model CE	69
b. Hasil Regresi Model FE	70
c. Hasil Regresi Model RE	71
2. Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	72
a. F Test (Chow Test).....	72
b. Hausman Test	72
D. INTERPRESTASI HASIL SECARA EKONOMI	73
1. Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran	73
2. Pengaruh Upah Terhadap Pengangguran	74
3. Pengaruh PDRB terhadap Pengangguran	76
BAB V PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	83

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Rasio Nasional dan Pengangguran.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Jawa Tengah	58
Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran	62
Tabel 4.3 Inflasi Jawa Tengah Jawa Tengah	65
Tabel 4.4 Upah Minimum Kabupaten Jawa Tengah.....	67
Tabel 4.5 PDRB Jawa Tengah	71
Tabel 4.6 Hasil Regresi Model CE	72
Tabel 4.7 Hasil Regresi Model FE.....	73
Tabel 4.8 Hasil Regresi Model RE	74
Tabel 4.9 Hasil F Test (Chow Test).....	75
Tabel 4.10 Hasil Hausman Test	76
Tabel 4.11 Uji Langrange Multiplier (LM) Test	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2015	4
Gambar 1.2 Pengangguran Terbuka 3 Provinsi di Pulau Jawa	5
Gambar 1.3 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2011-2015	7
Gambar 1.4 Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Tengah tahun 2011-2015.....	8
Gambar 2.1 Kurva Phillips.....	36
Gambar 2.2 Kurva Dampak Kenaikan Upah	38
Gambar 2.3 Kurva Hukum Okun	40
Gambar 2.4 Skema Kerangka Teoritis	43
Gambar 3.1 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi mengenai analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap pengangguran sudah banyak dilakukan. Untuk menganalisis variabel makroekonomi terhadap pengangguran menggunakan inflasi, upah dan PDRB. Ketiga variabel makroekonomi tersebut mempunyai hubungan yang erat terhadap pengangguran suatu daerah. Pendapat pertama menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara inflasi maupun PDRB terhadap pengangguran. Seperti yang diteliti oleh Mohammad Shafiur dan Md. Tanjil (2014) di Bangladesh, Nayyira Zeb dan kawan-kawan (2014) di Pakistan, Salmon Tarihoran (2014) di Sumatera Utara, Dania Safia Safitri (2011) di Jawa Tengah, Fajar Wahyu Utomo (2013) di Indonesia dan Ma'arif Ridho (2016) di Indonesia.

Sementara itu pendapat kedua menyatakan bahwa penggunaan variabel inflasi, upah maupun PDRB kurang relevan apabila digunakan dalam indikator terjadinya pengangguran. Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agil dan kawan-kawan (2014) di Pakistan, Rusmusi dan Agustin (2012) di Indonesia, Dania Safia Safitri (2011) di Jawa Tengah dan Riko Anggara (2016) di Jawa Timur. Berdasarkan riset gap diatas, studi ini akan meneliti lebih lanjut tentang analisis variabel makroekonomi terhadap pengangguran di Jawa Tengah.

Kemakmuran suatu bangsa merupakan tolak ukur kinerja pemerintah untuk mencapai perekonomian yang maksimal. Salah satu indikator kinerja keberhasilan perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan yang potensial yang disebabkan oleh perubahan tenaga kerja dan modal (Richard, dkk: 1992). Pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat dan masyarakat mampu untuk memenuhi hidup yang layak melalui kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuan merupakan tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah suatu daerah.

Tetapi pada kenyataanya masih banyak kasus yang terjadi dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Banyak faktor yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum berjalan dengan baik sesuai dengan kinerja pemerintah. Faktor-faktor tersebut antara lain peningkatan jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya, nilai upah yang selalu mengalami perubahan, jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu dan adanya tingkat inflasi yang terjadi pada masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok. Menurut Dudley Seers (dalam Arsyad, 2010), pembangunan ekonomi yang telah berjalan dengan baik yaitu dimana suatu negara atau daerah sudah mampu untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi

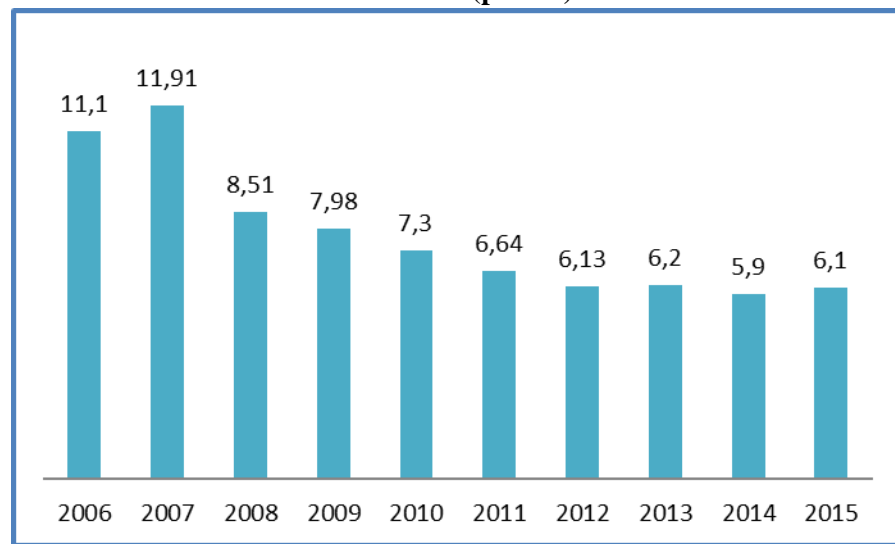
angka pengangguran dan distribusi pendapatan dapat merata sesuai dengan standar hidup masyarakat pada suatu daerah masing-masing.

Ketika salah satu indikator tersebut semakin mengalami peningkatan atau dapat dikatakan semakin memburuk maka daerah tersebut belum dapat dikatakan mengalami pembangunan ekonomi walaupun salah satu dari indikator tersebut mengalami peningkatan dua kali lipat dari indikator lainnya. Dengan begitu masalah pengangguran adalah masalah yang terbesar yang harus diselesaikan oleh suatu daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Nanga (2005), pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam keadaan kategori tenaga kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Meningkatkan lapangan pekerjaan merupakan salah satu langkah dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Kesempatan kerja yang tinggi akan mempengaruhi masyarakat untuk bekerja dengan begitu kemiskinan akan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat menjadi lebih baik untuk mencapai kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Ketika seseorang menganggur maka akan mengurangi tingkat pendapatan sehingga tingkat kemampuan suatu individu untuk mencapai kemakmuran semakin sulit (Sukirno, 2006). Tingkat pengangguran di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini membuktikan bahwa usaha pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia mendapatkan

keberhasilan walaupun belum sempurna. Seperti yang terlihat pada gambar 1.1 yang menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

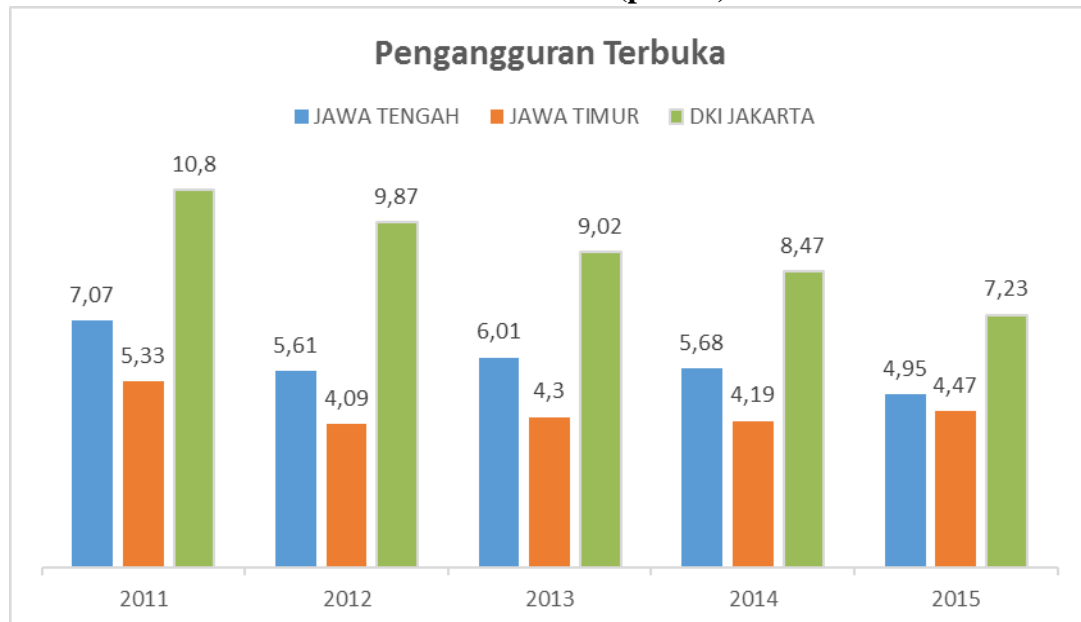
Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia
Tahun 2011-2015 (persen)



BPS Republik Indonesia 2017

Dalam 10 tahun terakhir ini tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2007 yaitu 11,91 % dan terendah pada tahun 2014 yaitu 5,9 %. Permasalahan pengangguran di Indonesia tidak jauh berbeda dengan permasalahan pengangguran di berbagai daerah di Indonesia. Pengangguran sudah menjadi masalah nasional maupun internasional yang harus di selesaikan oleh pemerintah daerah dan pusat. Seperti yang kita lihat pada gambar 1.2 mengenai tingkat pengangguran terbuka pada 3 Provinsi pada tahun 2011-2015.

Gambar 1.2
Pengangguran Terbuka (TPT) 3 Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2011-2015 (persen)



Sumber: BPS Republik Indonesia 2017

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling rendah diantara 3 Provinsi lainnya. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu 10,8% dan sampai pada tahun 2015 DKI Jakarta masih mempunyai tingkat pengangguran yang tertinggi yaitu 7,23%. Tingkat pengangguran DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dari tahun ke tahun di Pulau Jawa. (BPS, berbagai edisi). Badan Pusat Statistik (dalam ribunjateng.com), Jawa Tengah menginformasikan bahwa keadaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah menunjukkan adanya perubahan penurunan tingkat pengangguran, jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja.

Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas pada gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka terendah dari 2 provinsi lainnya. Pada tahun 2011 Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat pengangguran 7,07 % dan turun pada tahun 2012 sebesar 5,61 % hingga pada tahun 2015 menurun menjadi 4,95 % dari 33.774.140 orang dengan adanya penurunan jumlah pengangguran tersebut akan menjadi acuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang akan datang.

Jika dilihat perbandingan antara Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY, Jawa Tengah memiliki tingkat pengangguran terbesar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Perbandingan Antara Rasio Nasional dan Pengangguran Terbuka (TPT)
3 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2015 (persen)

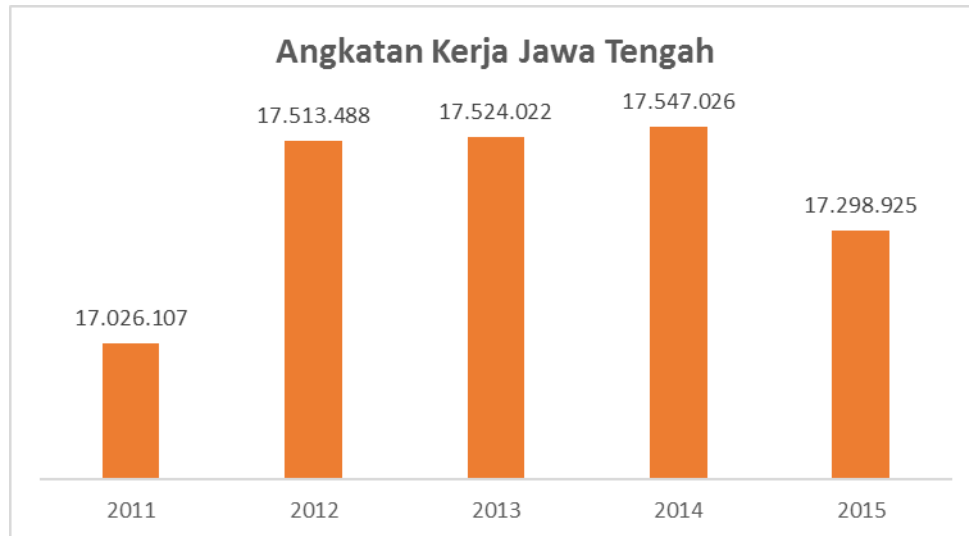
Wilayah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Nasional	6.80	6.32	5.92	5.70	5.81
Jawa Timur	4.18	4.13	4	4.02	4.31
DIY	5.47	4.09	3.8	2.16	4.07
Jawa Tengah	6.07	5.88	5.57	5.45	5.31

Sumber: Bappenas (berbagai wilayah dan edisi)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa, tingkat pengangguran di Jawa Tengah hampir sama dengan rata-rata nasional. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum berhasil menekan tingkat pengangguran.

Tetapi tingkat pengangguran masih dibawah tingkat nasional, menunjukkan perluasan lapangan kerja pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah.

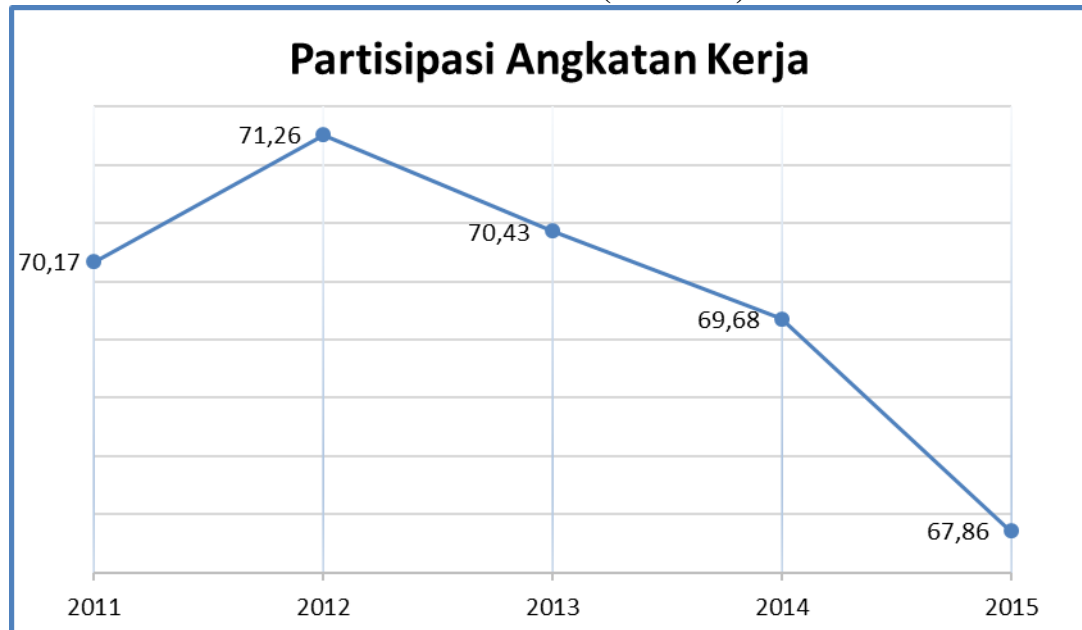
Gambr 1.3
Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015



Sumber: BPS, (dalam angka berbagai edisi)

Angkatan kerja di Jawa Tengah pada tahun 2011 mencapai 17.026.107 orang atau naik sebesar 0,37 % dibanding tahun sebelumnya (BPS, 2012). Dari tahun ketahun jumlah angkatan kerja selalu mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sejumlah 17.298.928 jiwa sehingga mempunyai nilai yang positif untuk dijadikan acuan pada tahun-tahun yang akan datang pada kinerja pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.4
Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015 (dalam %)



Sumber: BPS, (dalam angka berbagai edisi)

Tahun 2011 partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 70,17 %, mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar 71,26 % dan mulai tahun 2013 sampai 2015 selalu mengalami penurunan hingga mencapai jumlah 67,86 % dari jumlah penduduk Jawa Tengah (BPS, berbagai edisi). Hal tersebut seimbang dengan angka penurunan angkatan kerja yang selalu mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Permasalahan utama selanjutnya mengenai ketenagakerjaan di suatu daerah yaitu masalah upah yang rendah yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. hal tersebut disebabkan karena tingginya tenaga kerja baru yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tumbuhnya

lapangan pekerjaan yang dapat disediakan oleh pemerintah maupun swasta setiap tahunnya.

Menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999), semakin tinggi upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara lain dan lebih memilih bekerja pada negara sendiri. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah masih mengalami perubahan setiap tahunnya dan berada pada angka terbesar dari Jawa Timur dan DIY. Atas dasar penjelasan tersebut perlu dilakukan analisis mengenai masalah pengangguran di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Maka dari adanya masalah-masalah diatas penulis mengambil judul **“Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011-2015”**.

1.2 Perumusan Masalah

Pengangguran merupakan masalah yang bersifat mendasar yang selalu dihadapi oleh setiap daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap tahunnya, nilai upah yang selalu mengalami perubahan, jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu dan adanya tingkat inflasi yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengangguran. Untuk menurunkan angka pengangguran ini, maka perlu diketahui variabel makroekonomi apa saja yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat upah minimum, inflasi dan PDRB atas dasar konstan terhadap pengangguran terbuka dengan mengambil studi kasus di Kabupaten / Kota Jawa Tengah. Dengan demikian masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2011-2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis hubungan inflasi dengan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.
- b. Untuk menganalisis hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.

- c. Untuk menganalisis hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran tentang pengaruh dari inflasi, UMK, dan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) terhadap pengangguran di Jawa Tengah tahun 2011-2015.
- b. Sebagai referensi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dengan memberikan informasi tentang pengangguran terbuka serta faktor makro ekonomi apa saja yang berhubungan.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengangguran terbuka khususnya di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Basis Teori

a. Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*Manpower*) adalah kemampuan manusia untuk melakukan pekerjaan (Swasono,1987:20). Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan setiap orang atau penduduk pada suatu daerah yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua golongan (Susanti, 2000: 89):

- 1) Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan dengan tujuan mendapatkan nafkah atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Angkatan kerja terdiri dari tenaga kerja yang sedang bekerja dan tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan.
- 2) Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja karena alasan karena masih proses pendidikan, mengurus rumah tangga tanpa dibayar atau karena mereka dapat memenuhi kebutuhan

tanpa bekerja, misalnya penerima sewa atau karena hidup tergantung dari orang lain.

Mulyadi (2003) pengertian-pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yaitu:

1) Tenaga Kerja (*man power*)

Adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu daerah yang dapat memproduksi barang dan jasa.

2) Angkatan kerja (*labor force*)

Adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat dalam kegiatan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa.

3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate*)

Adalah jumlah angkatan kerja pada suatu kelompok umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.

4) Tingkat pengangguran terbuka (*Unemployment rate*)

Adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.

5) Pengangguran terbuka (*Open Unemployment*)

Merupakan bagian dari angkatan kerja yang sekarang tidak bekerja dan sedang aktif untuk mendapatkan pekerjaan.

Masalah yang terbesar dalam ketenagakerjaan adalah ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (*demand for labour*) dan penawaran

tenaga kerja (*supply of labour*) pada tingkat upah. Dalam teori klasik Adam Smith (1729-1790) dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang produktif merupakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah (Mulyadi, 2003). Sumber daya manusia yang produktif dengan pendidikan dan keahlian yang benar akan memberikan dampak yang positif bagi ketenagakerjaan.

b. Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja, memiliki usia angkatan kerja yang tidak bekerja apapun atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu dan sedang berusaha memperoleh suatu pekerjaan (Simanjuntak, 1985). Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat yang harus dihadapi oleh semua daerah (Mankiw, 2006:154). Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi seseorang itu belum mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan (Sukirno, 1994:294). Akibat dari pengangguran yaitu banyaknya masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Ketidakmampuan tersebut akan menimbulkan masalah sosial seperti: kriminalitas, prostitusi, pengemis, gelandangan, penjualan anak sampai banyaknya angka putus sekolah pada usia pendidikan. Menurut

Richard (1992), pengangguran dapat bersifat sukarela dan terpaksa. Pengangguran sukarela (*voluntary unemployment*) terjadi apabila ada kesempatan kerja tetapi orang yang menganggur itu tidak bersedia menerimanya pada tingkat upah yang berlaku sedangkan pengangguran terpaksa (*Involuntary Unemployment*) terjadi apabila seseorang bersedia mencari pekerjaan pada tingkat upah. BPS (2017), membedakan pengangguran dalam empat kelompok yaitu:

1) Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Merupakan pengangguran yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan.

2) Setengah Pengangguran Terpaksa (*Involuntary Under Employment*)

Merupakan golongan seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Seseorang itu tetapi sedang mencari pekerjaan atau dia sudah mendapatkan pekerjaan tetapi upah yang diterima lebih rendah dari tingkat yang diharapkan.

3) Setengah Sengangguran Sukarela (*Voluntary Unemployment*)

Merupakan golongan seseorang yang berfikir lebih baik menganggur dari pada menerima pekerjaan yang dirasa tidak sesuai dengan pendidikanya atau dengan upah yang rendah dari harapanya.

4) Pengangguran Terdidik

Merupakan pengangguran yang terjadi karena seseorang yang bekerja kurang dari kemampuan yang dimiliki. Mereka dapat melakukan

pekerjaan lebih dari keahliannya tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan itu dengan produktif.

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat dibagi menjadi empat (Gilarso, 2004:209)

a) Pengangguran Konjunktural

Pengangguran konjunktural disebabkan oleh adanya kemunduran ekonomi nasional. Jika permintaan masyarakat mengalami penurunan dan barang tidak laku untuk diperjual belikan dalam pasar, perusahaan akan mengurangi produksi sehingga pemakain faktor produksi (tenaga kerja) akan dikurangi sehingga menimbulkan angka pengangguran.

b) Pengangguran Struktural

Pengangguran ini terjadi karena adanya masalah dari segi penawaran. Kurangnya perusahaan industri, kurangnya prasarana, kurangnya modal, kurangnya keahlian yang dimiliki untuk melakukan proses produksi pada masyarakat hal ini akan menghambat proses produksi karena proses produksi tidak bisa ditingkatkan dan banyak faktor produksi yang di gunakan. Pengangguran struktural dapat terjadi juga karena adanya penggantian teknologi. Misalnya pemakaian mesin di pabrik rokok menggeser pemakaian tenaga manusia

c) Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terjadi secara berkala karena pengaruh musim. Misalnya pada sektor pertanian, pekerja paling padat adalah pada musim tanam dan musim panen tetapi dalam masa antara musim tanam dan panen maka akan terjadi banyak pengangguran. Pengangguran di pedesaan sering disebut juga pengangguran tersembunyi atau tak kentara (*disguised unemployment*) karena kelihatannya ada saja yang dikerjakan tetapi seandainya mereka tidak ikut bekerja produksi juga tidak akan berkurang.

d) Pengangguran Friksional

Pengangguran ini disebut juga dengan pengangguran peralihan. Terjadi karena perpindahan tenaga kerja dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan lainnya. Misalnya, terjadinya perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri atau bisa saja para pekerja sudah keluar dari pekerjaan yang lama dan belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Proses perpindahan itu selain memerlukan waktu juga memerlukan penyesuaian seperti memerlukan pelatihan mengenai ketrampilan teknis untuk bidang yang baru. Jenis pengangguran ini dalam negara-negara industri masih terbilang normal selama tidak melebihi sekitar 3-5%. Jadi *full employment* tidak berarti 100% tetapi sekitar 95% dari angkatan kerja yang bekerja.

Sedangkan Berdasarkan penyebab pengangguran menurut (Sadono Sukirno, 1994) :

1) Pengangguran Normal

Jika dalam suatu daerah terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka perekonomian suatu daerah tersebut dapat mencapai kesempatan kerja penuh. Pekerjaan ini terjadi bukan karena tidak ada kemampuan atau tidak sedang bekerja tetapi pengangguran ini sedang mencari pekerjaan yang baru dan sesuai dengan kemampuan dirinya. Dalam proses mencari pekerjaan yang baru pekerja itu di golongan menjadi pengangguran normal.

2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran ini diakibatkan karena adanya kemerosotan permintaan agregat sehingga perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja sehingga angka pengangguranpun menjadi bertambah. Ketika permintaan agregat tinggi maka hal itu akan mendorong kenaikan produksi barang dan jasa. Tetapi sebaliknya permintaan agregat akan menurun sehingga produksi akan dikurangi. Jadi pengangguran ini terjadi jika permintaan agregat mengalami penurunan dan perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja.

3) Pengangguran Struktural

Banyak faktor yang menjadi penyebab pengangguran struktural sehingga perusahaan yang ketika masanya mengalami kemajuan maka

bisa mengalami penurunan pada masanya. Hal ini mempunyai banyak faktor yang mempengaruhinya seperti keluarnya barang baru yang lebih baik dengan harga yang lebih murah, kemajuan teknologi, biaya pengeluaran yang tinggi dan tidak mampuan untuk bersaing karena ekspor produksi industri sangat menurun sehingga barang dan jasa dari negara lain lebih unggul. Dengan adanya faktor tersebut menyebabkan perusahaan memproduksi lebih sedikit dan mengurangi tenaga kerja.

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini ditimbulkan karena banyaknya penggunaan mesin dan adanya kemajuan teknologi dalam proses produksi. Dengan hasil yang cepat dan lebih baik maka perusahaan lebih baik mengurangi tenaga kerja. Pergantian tenaga manusia oleh tenaga-tenaga mesin dan kimia adalah penyebab utama dari pengangguran ini.

Menurut Todaro (2006) membedakan kurangnya pemanfaatan tenaga kerja sebagai berikut:

- 1) Pengangguran terbuka yaitu orang-orang yang benar-benar tidak bekerja baik secara sukarela maupun terpaksa.
- 2) Semi pengangguran yaitu seseorang yang jumlah jam kerjanya lebih sedikit dari kemampuan dan keinginan mereka.
- 3) Yang kelihatannya aktif dalam bekerja tetapi dalam kenyataannya kurang produktif, namun mempunyai batas-batasan sebagai berikut:

- a) Semi Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*)
Dimana banyak orang yang bekerja di pertanian, bangunan atau pegawai negeri secara penuh namun sebenarnya tidak membutuhkan waktu sepanjang itu.
- b) Pengangguran Tersembunyi (*Hidden Unemployment*) dimana seseorang terlibat dalam aktivitas pekerjaan seperti pekerjaan di bidang pendidikan dan pekerjaan rumah tangga yang disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan.
- c) Pensiunan Dini (*Premature Retirement*) dimana kekhususan yang terjadi di kalangan pegawai negeri.
- d) Mereka yang tidak mampu dimana pada kondisi ini mereka ingin bekerja penuh tetapi hasratnya terbentur pada kekurangan kesehatan.
- e) Mereka yang tidak produktif dimana para pekerja mampu untuk melakukan pekerjaan tetapi tidak memiliki sumber daya yang baik untuk menghasilkan output.

Menganggur bukanlah sebuah pilihan karena mereka tidak dapat menggunakan fikiran dan sumber daya yang mereka miliki dengan baik. Secara pokok terdapat tiga sebab seseorang keluar dari kelompok pengangguran (Dornbusch 2008:152):

- 1) Seseorang yang direkrut dan mendapat pekerjaan baru.
- 2) Seseorang yang pernah diberhentikan kemudian dipanggil kembali oleh perusahaan untuk melakukan pekerjaan.
- 3) Pengangguran yang berhenti mencari pekerjaan dan secara nyata keluar dari angkatan kerja.
- 4) Seseorang itu baru memasuki angkatan kerja, orang yang baru pertama kali mencari pekerjaan atau bisa jadi orang yang sudah diterima kerja tetapi masih akan mencari pekerjaan yang baru.
- 5) Orang yang keluar dari pekerjaannya karena pekerjaan yang lama tidak sesuai dengan harapannya dan mendaftarkan diri sebagai pengangguran pada lowongan yang baru.
- 6) Orang yang mungkin diberhentikan sementara dari pekerjaannya tetapi masih ada penagguhan kerja tanpa upah yang dilakukan lebih dari 7 hari, diberlakukan oleh pemberi kerja.
- 7) Para pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena dipecat atau karena perusahaan mengalami kebangkrutan.

Berbagai kebijakan di bidang pengangguran (Bellant, 1983) yaitu:

- a) Asuransi pengangguran tujuannya adalah melindungi para pekerja terhadap kesulitan keuangan pada saat dilanda pengangguran dengan cara memotong pendapatan karyawan saat masih produktif.

- b) Jaminan sosial tujuan dari kebijakan ini adalah pemberian suatu jaminan pendapatan hari tua bagi karyawan. Dengan cara pajak atau biaya di bebaskan kepada karyawan dan majikan atau perusahaan.
- c) Kompensasi pekerja tujuan dari kebijakan ini adalah usaha pelaksana negara sepenuhnya yang mendapat cedera pada waktu melakukan tugas atau menderita penyakit tertentu selama memegang jabatan pada perusahaan tersebut.

Pengangguran yang akan terjadi dalam suatu daerah akan menurunkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada daerah tersebut. pengangguran yang berkelanjutan akan menimbulkan efek psikologis bagi diri penganggur dan keluarganya (Gilarso, 2004:209).

c. Teori Upah

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran (Mankiw, 2000). Upah adalah pendapatan yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya upah atau gaji tetapi juga dalam cangkupan lembur dan tunjangan yang diterima secara rutin (BPS, 2017). Menurut Gilarso, (2003) upah tenaga kerja ada dua penilaian, untuk perusahaan atau penggaji upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan serendah mungkin agar mendapatkan laba yang maksimal sedangkan untuk pekerja upah merupakan sumber

penghasilan bagi dirinya dan keluarganya maka dari itu upah bagi pekerja adalah sumber pembelanjaan dalam kehidupan sehari-hari.

Upah yang semakin tinggi maka dapat mempengaruhi pada peningkatan biaya produksi, yang akan memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja dan akan memberikan dampak yang negatif yaitu penambahan angka pengangguran. Menurut sistemnya tingkat upah dapat di bagi menjadi lima (Gilarso, 2003):

1) Upah menurut prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya upah yang diterima oleh tenaga kerja sesuai dengan prestasi kerja. Banyak sedikitnya upah ditentukan dari hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Tetapi cara ini hanya dapat diukur secara kuantitatif yaitu dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakain dll.

2) Upah waktu

Upah waktu adalah besarnya upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja dalam melakukan pekerjaanya. Dapat dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Cara sistem ini memungkinkan mutu pekerjaan yang lebih baik karena karyawan tidak tergesa-gesa tetapi dalam sistem ini perlu pengawasan yang benar-benar teliti apakah pekerja sungguh-sungguh bekerja selama jam kerja atau tidak.

3) Upah borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan atau dikerjakan banyak orang. Cara perhitungan upah dalam sistem ini sering dipakai pada pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Misalnya pembangunan sekolah, pembangunan jalan dll.

4) Upah premi

Upah premi merupakan gabungan dari upah waktu dan upah potongan. Misalnya apabila seseorang mencapai prestasi yang lebih dari yang diharapkan pekerja tersebut akan di beri premi. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi ditentukan oleh waktu dan studi gerak.

5) Upah bagi hasil

Upah ini banyak digunakan pada sektor pertanian dan dalam usaha keluarga.

6) Peraturan gaji pegawai negeri

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip yaitu pendidikan dan masa kerja. Seseorang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

Tingkat upah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Ananta, 1999):

1) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)

Merupakan kebutuhan pokok seseorang atau tenaga kerja yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi yang dilihat dari barang dan jasa yang dibutuhkan.

2) Indeks Harga Konsumen (IHK)

Merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup, peningkatan terhadap harga kebutuhan hidup dan secara tidak langsung dapat mencerminkan tingkat inflasi.

3) Pertumbuhan ekonomi daerah

Mencerminkan dimana keadaan perekonomian dalam suatu daerah yang mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang berjalan di daerah yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah dijelaskan upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaannya. Upah yang dimaksud disini yaitu sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- 1) Upah tanpa tunjangan
- 2) Upah pokok dan tunjangan tetap
- 3) Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

d. Teori Inflasi

Phillips. W (dalam Dornbusch, 2008:120), Kurva Phillips adalah hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah nominal. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat kenaikan upah dan semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah pula tingkat inflasi dan upah. Sehingga terdapat *tradeoff* antara inflasi, upah dan pengangguran. Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus (Boediono, 1985:155). Penggolongan inflasi didasarkan atas parah atau tidaknya dibedakan menjadi (Boediono, 1986:156):

- 1) Inflasi ringan (dibawah 100% pertahun)
- 2) Inflasi sedang (antara 10-30% pertahun)
- 3) Inflasi berat (antara 30-100% pertahun)
- 4) Hiperinflasi (diatas 100% pertahun)

Berdasarkan penggolongan sebabnya inflasi dapat dibedakan menjadi (Boediono, 1986:156):

- 1) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat (*demand inflation*)
- 2) Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi (*cost inflation*).

Menurut Boediono (1985:158) inflasi dapat digolongkan berdasarkan asal dari adanya inflsi, antara lain:

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic Inflation*)

Inflasi ini timbul karena adanya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal dan lain sebagainya.

Kenaikan barang-barang yang kita beli dari negara lain (impor) mengakibatkan:

- a) Kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor.
- b) Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi kemudian harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin harus di impor (*cost inflation*).
- c) Menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (*demand inflation*).

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara yang bekerjasama dengan negara kita. Kenaikan barang-barang ekspor juga akan mempengaruhi barang-barang impor antara lain:

- a) Bila harga barang ekspor naik (seperti kopi dan teh) maka indeks biaya hidup akan naik sebab barang-barang ini langsung masuk dalam daftar indeks harga.
- b) Bila harga barang-barang ekspor (seperti kayu dan kulit) naik maka ongkos produksi barang yang akan memakai bahan tersebut (perumahan dan sepatu) akan naik, dan harga jualnya akan naik juga (*cost inflation*).
- c) Kenaikan harga barang-barang ekspor berarti akan menaikkan penghasilan eksportir. Ketika eksportir mendapatkan penghasilan maka mereka akan membelanjakannya sehingga harga-harga akan naik juga (*demand inflatiaon*).

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing membahas aspek tertentu dari proses inflasi serta mencakup aspek penting dari proses kenaikan harga (Boediono, 1985:160-168):

1) Teori Kuantitas

Teori kuantitas sangat berguna untuk menjelaskan proses inflasi pada zaman modern terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Teori ini menyoroti peranan proses inflsi dari jumlah uang yang beredar, harapan masyarakat mengenai harga-harga. Ada tiga keadaan pada mayarakat dalam keadaan inflasi ini anatar lain:

- a) Inflasi yang hanya bisa terjadi karena penambahan volume uang yang beredar. Tanpa adanya kenaikan jumlah uang yang beredar (berupa uang kartal maupun uang giral) tidak menjadi masalah dalam inflasi ini. Pada keadaan ini masyarakat belum mengharapkan harga-harga untuk naik maka adanya penambahan uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat dan hanya digunakan untuk menambah tabungan mereka sehingga uang tidak dibelanjakan dan tidak ada kenaikan permintaan yang berarti akan barang-barang. Sehingga pada keadaan ini masyarakat belum sadar mengenai adanya inflasi.
- b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan uang yang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Pada keadaan ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya inflasi. Penambahan jumlah uang beredar sudah tidak berarti untuk masyarakat sehingga masyarakat mengeluarkan simpanan mereka untuk membeli barang-barang karena mereka menghindari terjadinya kerugian.
- c) Keadaan selanjutnya yaitu dimana pada tahap ini terjadi inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi. Dimana masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Keadaan ini ditandai dengan makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation*) yang menaik. Inflasi ini pernah

terjadi di Indonesia pada tahun 1961-1966. Hiperinflasi menghancurkan sendi ekonomi moneter dan sendi politik dalam masyarakat. Sehingga struktur yang baru menggantikan struktur yang lama.

2) Teori Keynes

Menurut teori ini terjadi karena suatu keadaan dimana masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi dari pandangan teori ini yaitu dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*). *Inflationary gap* timbul karena golongan masyarakat-masyarakat tersebut berhasil memperoleh dana untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Golongan-golongan masyarakat tersebut antara lain:

a) Golongan Pemerintah

Dimana pada golongan ini mereka berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru.

b) Golongan pengusaha

Golongan ini menginginkan untuk melakukan investasi baru dan memperoleh dana pembiayaan kredit dari bank.

c) Golongan serikat buruh

Golongan ini berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota-anggotanya melebihi produktivitas buruh.

Jika pada ketiga golongan tersebut mempunyai jumlah permintaan yang efektif pada harga yang berlaku dan melebihi jumlah maksimum dari jumlah barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat maka akan timbul inflationary gap.

3) Teori Strukturalis

Teori ini didasarkan atas pengalaman dari negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang khususnya Indonesia. Menurut teori ini ada dua faktor utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi antara lain:

- a) Pertama berupa ketidak elastisan dari penerimaan ekspor, yaitu ekspor yang tumbuh secara lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan pada keadaan ini disebabkan yang pertama karena harga barang-barang ekspor pada pasar dunia semakin tidak menguntungkan dibandingkan dengan harga-harga impor yang harus dibayar. Kedua adalah produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga. Kelambanan pertumbuhan ekspor ini terjadi

karena kelambanan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Akibatnya negara tersebut mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang yang sebelumnya di impor.

- b) Kedua yaitu berupa ketidak elastisan dari produksi bahan makanan di dalam negeri. Dalam keadaan ini produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertumbuhan penduduk dan penghasilan masyarakat sehingga harga makanan di dalam negeri cenderung naik sehingga mendorong adanya kenaikan permintaan.

Menurut Nanga (2005) ada tiga hal yang harus ditekankan pada inflasi yaitu:

- 1) Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, artinya besar kemungkinan tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu dapat mengalami penurunan atau kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi tetap menunjukkan tendensi yang meningkat.
- 2) Kenaikan tingkat harga berlangsung secara terus menerus (*sustained*), artinya bukan terjadi pada satu waktu saja tetapi juga akan terjadi pada beberapa waktu kemudian.

- 3) Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga umum, yang artinya tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya satu atau beberapa komoditi tetapi untuk harga secara umum.

e. Teori PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah (BPS, 2017). PDRB mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap angkatan kerja ketika PDRB mengalami peningkatan maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi juga mengalami kenaikan sehingga terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran. Menurut cara penyajian PDRB disusun menjadi dua BPS (2017):

- 1) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan

PDRB menunjukkan jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dari perhitungan ini dapat diketahui PDRB riil.

- 2) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB ini menggambarkan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai dalam proses produksi.

Ada tiga cara untuk menghitung PDRB (Tarigan, 2005:24):

1) Menurut Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan ini penghitungan PDRB dengan menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah dikurangi biaya masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara bahan baku dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2) Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan diperkirakan dengan menjumlah semua balas jasa yang diterima faktor produksi (upah, gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung netto). Surplus usaha terdiri dari uang yang dibayarka neto, sewa tanah dan keuantuangan.

3) Menurut Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini dihitung dari menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang di produksi di dalam negeri.

f. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

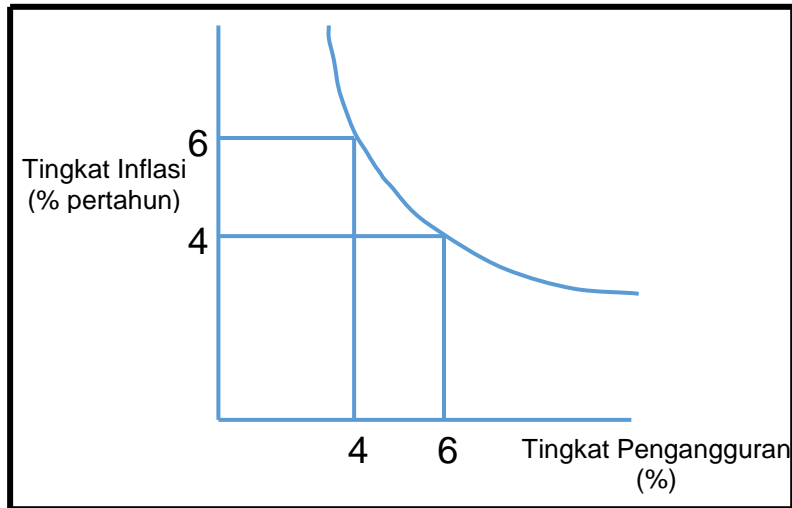
1) Pengaruh inflasi terhadap pengangguran

Gallup Report (dalam Dornbusch, 2008:146) menyatakan bahwa ketika tingkat inflasi dan tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka akan menjadi isu yang paling utama dan sebaliknya

jika keduanya dalam posisi rendah maka akan menghilang dari daftar perhatian. Hal ini dapat memperkuat adanya hubungan antara inflasi dan pengangguran mempunyai pengaruh yang cukup besar. Dornbusch (2008:379-381) menegaskan bahwa antara inflasi dan pengangguran terdapat hubungan yang sangat penting sehingga menjadi ukuran kinerja perekonomian dan perkembangan makroekonomi dari keduanya sering dilihat dalam kurva Phillips. Sejarah negara Amerika Serikat pada tahun 1960 sampai tahun 2001 membuktikan adanya keterkaitan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sejarah di negara Amerika Serikat yaitu pertama, pengangguran yang rendah mendorong kenaikan inflasi hal itu terjadi pada tahun 1960. Kedua, pengangguran yang tinggi mendorong penurunan inflasi di Amerika Serikat. Amir (2007), juga menjelaskan mengenai sejarah inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Phillips dikenal dengan kurva Phillips.

Gambar 2.1
Kurva Phillips



Sumber: Amir (2007)

Berdasarkan gambar 2.1 terdapat hubungan yang sangat mendasar antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di dasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya permintaan agregat. Dengan adanya kenaikan permintaan agregat maka berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik. Selanjutnya kenaikan permintaan akan menaikkan pula harga. Dengan tingginya tingkat harga (inflasi) maka akan mempengaruhi permintaan sehingga produsen akan meningkatkan produksinya dengan menambah tenaga kerja. Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja dan adanya kenaikan harga-harga (inflasi) maka tingkat pengangguran menjadi berkurang.

2) Pengaruh upah terhadap pengangguran

Hubungan antara tingkat upah dan tingkat pengangguran yang saling mempengaruhi dijelaskan oleh Mankiw (2000). Upah

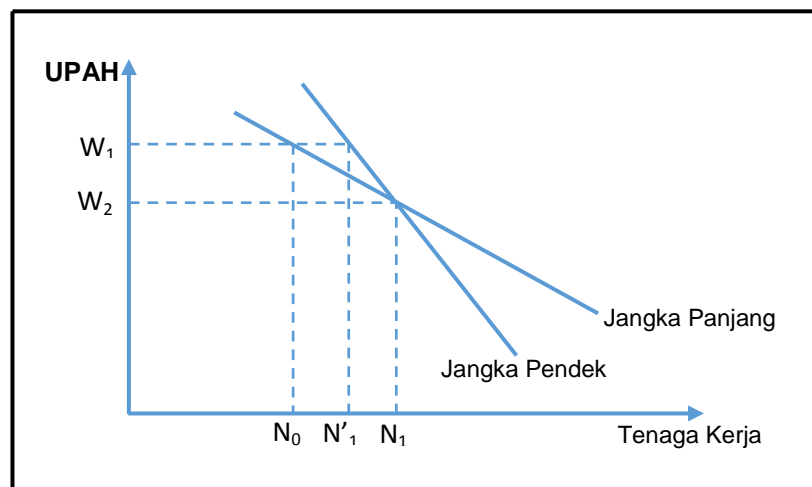
merupakan pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang yang mencakup bukan saja mengenai upah dan gaji tetapi juga mencakup tunjangan yang diterima secara rutin. semakin tinggi upah yang diberikan kepada pekerja maka semakin tinggi pula pekerjaan dan waktu yang diberikan dalam proses produksi. Kenaikan tingkat upah akan mempunyai dampak sebagai berikut (Sumarsono, 2003):

- a) Pertama naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, harga barang yang diproduksi menjadi naik. Dengan kenaikan harga tersebut konsumen akan lebih respon terhadap barang tersebut. Konsumen akan membandingkan barang satu dengan barang lainnya dengan kualitas yang sama tetapi memiliki harga yang lebih rendah. Dengan adanya respon yang cepat dari konsumen maka barang yang telah diproduksi tidak terjual dan terpaksa produsen akan menurunkan jumlah produksinya. Berkurangnya jumlah produksi mendorong perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja. Penurunan jumlah tenaga kerja karena berkurangnya produksi dalam suatu perusahaan disebut dengan efek skala produksi (*scale effect*).
- b) Kedua naiknya tingkat upah akan memberikan dorongan kepada pengusaha atau perusahaan untuk menggunakan teknologi padat modal atau dalam proses produksinya tenaga kerja digantikan oleh

tenaga mesin. Perusahaan akan lebih berfikir dengan menggunakan mesin yang sedikit tetapi mendapatkan hasil yang maksimal tanpa harus membayar upah yang besar. Penurunan jumlah tenaga kerja karena penggantian tenaga kerja ke tenaga mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*capital intensive*).

Selain mengenai penjelasan di atas teori mengenai tingkat upah juga dijelaskan menggunakan kurva mengenai bagaimana dampak kenaikan tingkat upah dan permintaan tenaga kerja dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Sehingga hal ini dapat menunjukkan lebih elastis mana antara jangka pendek dan jangka panjang dalam mempengaruhi pengangguran. Hal ini dapat ditunjukkan dalam gambar (2.2) sebagai berikut:

Gambar 2.2
Dampak Kenaikan Upah terhadap Permintaan Tenaga Kerja dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang



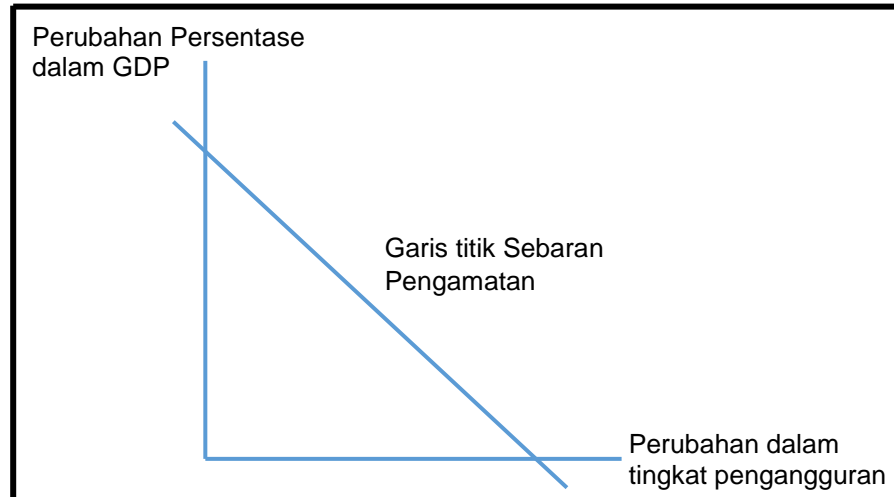
Sumber : Belante, 1983

Gambar 2.2 Menjelaskan bahwa kenaikan upah yang terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang memberikan hasil yang berbeda. Kenaikan tingkat upah dalam jangka panjang lebih elastis atau lebih mendorong terjadinya pengurangan tenaga kerja. Sehingga menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kenaikan tingkat upah yang terjadi pada suatu daerah akan menimbulkan pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan dan akan mendorong pertambahan angka pengangguran.

3) Pengaruh PDRB terhadap pengangguran

Adanya hubungan negatif antara PDB (*gross Domestic Product*) dengan pengangguran telah diperjelas dalam hukum Okun yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi Arthur Okun (Mankiw, 2007). Dalam hubungan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesempatan kerja dan GDP riil. Arthur Okun menunjukkan hukum Okun pada kurva dengan menggunakan data tahunan negara Amerika Serikat seperti terlihat pada Gambar 2.3 dibawah ini:

Gambar 2.3
Kurva Hukum Okun



Sumber : Mankiw, 2007:251

Gambar 2.3 menjelaskan titik sebar dari perubahan dalam tingkat pengangguran terdapat pada sumbu horizontal dan perubahan GDP riil terdapat pada sumbu vertikal. Artinya perubahan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun sangat erat hubungannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun. Setiap adanya tingkat peningkatan angka pengangguran dalam suatu negara maka akan setara dengan terjadinya penurunan GDP riil. Maka dengan meningkatnya tingkat PDRB tingkat pengangguran juga akan mengalami penurunan. Hukum okun sebagai penguat faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor yang membentuk faktor ekonomi jangka panjang. Dalam hukum Okun terdapat tiga hal yang sangat penting sebagai pedoman hubungan antara PDRB dengan pengangguran yaitu:

- a) Pertumbuhan jangka panjang dalam GDP hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi.
- b) Pertumbuhan jangka pendek dalam GDP ditentukan oleh angkatan kerja.
- c) Penurunan produksi barang dan jasa selama resesi ditentukan oleh peningkatan jumlah penganggura.

2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Aqil dan kawan-kawan (2014)	Determinants Of Unemployment In Pakistan	Y: Pengangguran X1: GDP X2: Inflasi X3: Foreign Direct Investment X4: Pertumbuhan Penduduk	Pertumbuhan GDP dan inflasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Foreign Direct Investment dan pertumbuhan penduduk memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengangguran.
2.	Mohammad Shafiur Chowdhury dan Md. Tanjil Hossin (2014)	Determinants Of Unemployment In Bangladesh: "A Case Study"	Y: Pengangguran X1: GDP X2: Tingkat Kurs X3: Tingkat Inflasi	Variabel GDP, tingkat kurs dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.

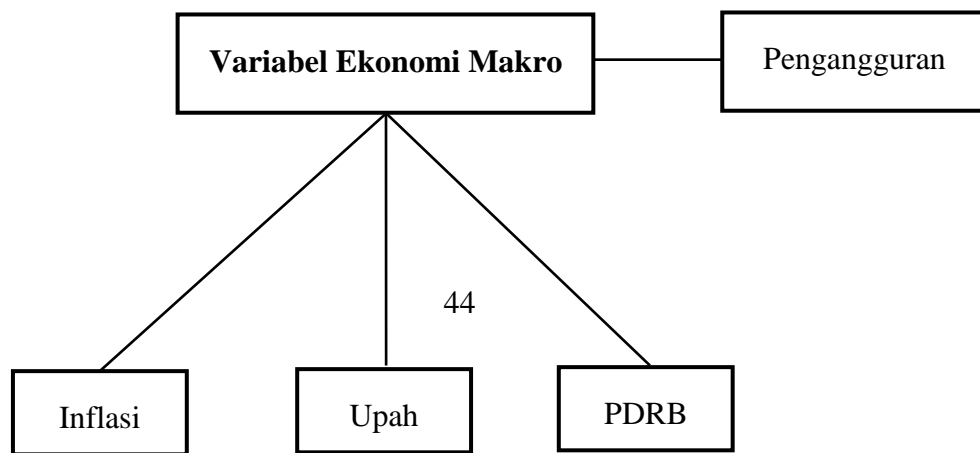
3.	Nayyira Zeb, Fu Qiang and Muhammad Suhail Sharif (2014)	Foreign Direct Invesment And Unemployment Reduction In Pakistan	Y: Pengangguran X1: Indeks Korupsi X2: FDI X3: Inflasi X4: Pertumbuhan Penduduk	Indeks korupsi tidak signifikan terhadap pengangguran. Pertumbuhan penduduk menunjukkan nilai positif dan variabel FDI dan inflasi menunjukkan nilai negatif terhadap pengangguran.
4	Nur Ravika Farmala Sari (2016) Vol. 14, No. 01 Juni 2016	Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur Tahun 2010-2014	Y: Pengangguran X1: PDRB X2:UMK X3:Investasi X4:Pengeluaran Pemerintah	Secara parsial variabel PDRB, UMK, PMDN dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur sedangkan PMA tidak berpengaruh signifikan .
5	Rusmusi IMP dan Agustin Susyatna Dewi (2012) Vol.7, No. 1, Maret 2012	Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Pengangguran di Inonesia (Periode 2001-2010)	Y: Pengangguran X1: Inflasi X2: Pertumbuhan Ekonomi X3: Investasi	Variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi dan investasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pengangguran.
6	Salmon Tarihoran (2014)	Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap	Y: Pengangguran X1: Inflasi X2: Pertumbuhan	Variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi,

	Tesis	Pengangguran di Sumatera Utara	Ekonomi X3:Angkatan Kerja X4:Upah X5:Krisis Ekonomi	pertumbuhan angkatan kerja, upah dan krisis ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara
7	Dania Safia Safitri (2011)	Pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009	Y: Pengangguran X1: Inflasi X2: PDRB	Variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran
8	Fajar Wahyu Utomo (2013)	Pengaruh Inflasi dan Upah terhadap Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1980-2010	Y: Pengangguran X1: Inflasi X2: Upah	Variabel inflasi dan upah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia
9	Ma'arif Ridho Setyawan (Skripsi, 2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Inonesia tahun 1991-2015	Y1: Pengangguran X1: Jumlah penduduk X2: Upah X3: Inflasi	Jumlah penduduk signifikan, Upah berpengaruh signifikan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia tahun 1999-2015

10	Riko Anggara (Skripsi, 2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014	Y1: Pengangguran X1: PDRB X2: UMK X3: Jumlah Penduduk X4: Konsumsi Pemerintah X5: PMTB	Variabel PDRB tidak signifikan , variabel UMK tidak signifikan, jumlah penduduk signifikan, Konsumsi pemerintah signifikan dan PMTB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Jawa timur tahun
----	------------------------------------	--	--	--

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Dengan adanya perbedaan hasil dari beberapa peneliti terdahulu, maka akan dilakukan pengujian kembali pada variabel yang sebelumnya pernah dilakukan. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran maka disusun suatu kerangka teoritis dengan tujuan agar dalam penyusunan penelitin mempunyai alur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Model yang menunjukkan hubungan tersebut disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.4 Skema Kerangka Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu variabel makroekonomi yang terdiri dari inflasi, upah dan PDRB terhadap variabel dependen yaitu pengangguran di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Tingginya inflasi akan berdampak negatif pada produksi suatu perusahaan ketika biaya bahan baku untuk proses produksi naik akibatnya biaya produksi juga mengalami kenaikan. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja atau mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga akan menambah tingkat pengangguran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Agustin dan Rusmusi (2012) yang menunjukkan tidak berlakunya Kurva Phillips yang di Indonesia karena faktor inflasi karena inflasi di Indonesia tidak disebabkan oleh permintaan agregat melainkan kenaikan harga, misalnya kenaikan BBM dan Indonesia lebih menerapkan pdat modal bukan padat karya sehingga

kebutuhan lapangan kerja lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Jika seluruh tingkat upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya terjadi peningkatan pengangguran hingga seseorang tersebut dapat memiliki pekerja sesuai dengan keahlian dan upah yang mereka inginkan (Simanjuntak, 2001). Jika upah pada suatu daerah rendah maka akan berakibat tingginya tingkat pengangguran pada daerah tersebut. namun jika dilihat dari sisi pengusaha atau perusahaan dengan meningkatnya upah maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan untuk mengurangi tenaga kerja dan akan mengakibatkan pengangguran.

PDRB mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah angkatan kerja. Apabila PDRB mengalami peningkatan maka jumlah nilai output dalam seluruh unit ekonomi akan meningkat sehingga terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, maka angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen (Samuelson, 2001). Tingkat PDRB yang tinggi dalam suatu daerah akan bisa mengurangi pengangguran melalui peningkatan produksi dalam suatu perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja lebih banyak.

Dari kerangka pemikiran teoritis maka penelitian ini bertujuan untuk memperbaharui penelitian terdahulu.

C. HIPOTESIS

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya agar menjadi petunjuk yang jelas. Fungsi dari hipotesis adalah untuk memberikan petunjuk atau gambaran yang tegas dan benar dalam penelitian, membantu dalam penentuan arah yang harus ditempuh dalam pembatasan ruang lingkup penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Dengan asumsi jika tingkat inflasi semakin tinggi maka tingkat pengangguran berkurang.
2. Diduga upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. .
3. Diduga PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Dengan asumsi semakin tinggi jumlah PDRB dalam suatu daerah maka tingkat pengangguran akan semakin berkurang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai analisis pengaruh variabel ekonomi makro terhadap pengangguran dengan mengambil studi kasus di kabupaten/kota Jawa Tengah dalam periode tahun 2011-2015. Dengan variabel yang dianalisis adalah upah minimum, inflasi dan PDRB atas dasar harga konstan.

B. Definisi Operasional Variabel

Terdapat tiga macam variabel yang dianalisis pada penelitian ini, yaitu:

1. Variabel Terikat ($Y = \textit{dependent variabel}$)

a. Jumlah Pengangguran (Unemployment)

Data pengangguran yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS Jawa Tengah tahun 2017. Jumlah pengangguran dalam penelitian ini dinyatakan dalam persen yang terdapat di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah.

2. Variabel Bebas ($X = \textit{independent variabel}$)

a. Inflasi

Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS berbagai edisi Provinsi Jawa Tengah. Data inflasi ini dinyatakan dalam bentuk persen.

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah minimum dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk rupiah yang terdapat di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah.

c. PDRB

Data PDRB dalam penelitian ini diambil dari publikasi BPS Jawa Tengah dengan jenis PDRB atas dasar harga konstan (IHK). Data PDRB berupa tahunan dalam 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan dinyatakan dalam juta rupiah.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data panel yaitu gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Yang terdiri dari 30 kabupaten dan 5 kota di Jawa Tengah dan menggunakan periode waktu tahun 2011-2015 dengan tahun dasar 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian tidak langsung tetapi melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data dari penelitian ini diperoleh dari instansi terkait dengan permasalahan penelitian seperti BPS (Badan Pusat Statistik) dan disini data diperoleh dari BPS Jawa Tengah tahun 2017 dan berbagai edisi dan jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Data yang

diperlukan dalam penelitian ini meliputi: upah minimum, inflasi dan PDRB atas dasar harga konstan.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengakses langsung situs resmi BPS (Bada Pusat Statisti) data terkait. Hasil penelitian terdahulu, fasilitas internet dan bahan literatur lainnya seperti studyi perpustakaan juga mmelengkapi pengumpulan data yang diperlukan.

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Data Panel

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel. Panel data memiliki beberapa kelebihan dibanding data *time series* dan data *cross section*. Kelebihan dari data panel antara lain:

- a. Panel data memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi hal ini disebabkan karena data panel melibatkan beberapa variabel dan waktu. Dengan data panel kita dapat mengestimasi karakteristik setiap variabel berdasarkan heterogenitas.
- b. Panel data memberikan data yang informatif, bervariasi dan memiliki tingkat kolinearitas yang rendah hal ini disebabkan karena dalam data panel menggabungkan antara data *time series* dengan *cross section*.

- c. Data panel cocok untuk studi perubahan dinamis karena data panel pada dasarnya adalah data *time series* yang diulang-ulang.
 - d. Panel data mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi dengan data *time series* murni dan data *cross section* murni.
 - e. Data panel juga mampu mendeteksi model perilaku yang lebih kompleks.
2. Metode yang digunakan untuk untuk mengoperasikan data panel ada beberapa tahap antara lain:
- a. Membuat regresi data panel yang terdiri dari:

1) *Common Effect (CE)*

Metode ini mengestimasi data panel dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Metode ini secara sederhana menggabungkan seluruh data *time series* dan *cross section*, serta beranggapan bahwa baik *intercept* dan *slope* dianggap sama untuk tiap variabel dan waktu.

2) *Fixed Effect (FE)*

Metode dengan pendekatan *Fixed Effect (FE)* memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted-variables*, yang mungkin akan memberikan perubahan pada *intercept time series* dan *cross section*. Model dengan pendekatan

ini menambah variabel *dummy* untuk mengizinkan adanya perubahan *intercept* yang digunakan.

3) *Random Effect (RE)*

Metode pendekatan *Random Effect (RE)* merupakan variasi dari estimasi *Generalized Least Square (GLS)*. Pendekatan ini memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan *error* dari data *time series*. Sebelum menentukan metode estimasi data panel yang digunakan seharusnya dilakukan beberapa pengujian terlebih dahulu. Untuk menentukan apakah model panel data dapat diregresikan atau tidak dengan metode *Pooled Least Square (PLS)* atau metode *Random Effect (RE)*.

3. Memilih model regresi data panel yang paling tepat sesuai dengan penelitian yaitu dengan beberapa uji, antara lain:

a. F Test (Chow Test)

Uji Chow Test digunakan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *Common Effect (CE)* dan *Fixed Effect (FE)*.

Prosedur Uji *Chow Test* yaitu:

- 1) Buat Hipotesis dari Uji *Chow Test*

H_0 = model *Common Effect* (CE)

H_1 = model *Fixed Effect* (FE)

2) Menentukan kriteria uji

Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis H_0 ditolak yang artinya kita harus memilih teknik FE.

Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis H_0 diterima yang artinya kita harus memilih teknik CE

b. Uji Hausman

Uji .Hausman Test digunakan untuk membandingkan atau memilih midel regresi mana yang terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Prosedur Uji Hausman yaitu:

1) Buat hipotesis dari Uji Hausman : $H_0 = \text{Random Effect (RE)}$ dan $H_1 = \text{Fixed Effect (FE)}$

2) Menentukan kriteria uji : apabila $\text{Chi-Square}_{hitung} > \text{Chi-Square}_{tabel}$ dan p-value signifikan, maka hipotesis H_0 di tolak, sehingga metode FE lebih tepat untuk digunakan. Dan apabila $\text{Chi-Square}_{hitung} < \text{Chi-Square}_{tabel}$ dan p-value signifikan, maka hipotesis H_0 diterima, sehingga metode FE lebih tepat untuk digunakan.

c. Langrangge Multiplier (LM) Test

Langrangge Multiplier Test digunakan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara CE dan RE.

Hipotesis Uji LM Test

$H_0 = \text{Common Effect Model (CE)}$

H_0 = Random Effect Model (RE)

Nilai probabilitas value dapat dilihat nilai yang ada dibawah Prob. Breusch-Pagan (BP), jika Prob. BP nilainya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dengan kata lain model yang terpilih adalah Random Effect Model.

4. Penyembuhan Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data Cross Section, hal ini disebabkan regresi data panel. Dari ketiga model regresi CE, FE dan RE yang tidak memungkinkan terjadinya heteroskedastisitas adalah model regresi RE. sehingga jika RE yang menjadi model yang tepat pada regresi data panel tidak perlu lagi dilakukan penyembuhan terhadap Heteroskedastisitas.

5. Model Analisis

Dalam metode ini untuk mengetahui pengaruh inflasi, UMK dan PDRB terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, maka model yang akan diestimasi adalah:

$$UE = f(UMK, INFLASI, PDRB)$$

Untuk memudahkan estimasi, maka fungsi di atas akan ditransformasikan kedalam persamaan regresi linier berganda, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$UE_{it} = \alpha_{it} + \beta_{UMK}UMK_{it} + \beta_I I_{it} + \beta_{PDRB}PDRB_{it} + \beta_{Ifit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

UE = Jumlah Pengangguran (Persen)

UMK = UMK (Upah Minimum Kabupaten) (Rupiah)

I = Inflasi (Persen)

PDRB = Produk Domestik Bruto (Rupiah)

α = Error tern

β = Nilai Koofisien variabel

ε = Error tern

i = Kabupaten/ Kota

t = Tahun

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan mendiskripsikan mengenai daerah yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu Provinsi Jawa Tengah. Secara umum akan dibahas mengenai kondisi geografi, kondisi demografi, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan kondisi administrasi pemerintahan.

Analisis deskriptif akan membahas mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap pengangguran. Variabel makroekonomi yang terdiri dari Inflasi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Tengah (2010) tahun 2011-2015.

Pada analisis hasil akan dibahas mengenai pengaruh antara variabel makroekonomi terhadap pengangguran menggunakan pemilihan model regresi data panel yang terdiri dari *Common Effect* (CE), *Fixed Effect* (FE) dan *Random Effect* (RE). Kemudian memilih model regresi data panel yang paling tepat digunakan dalam penelitian dengan menggunakan 3 uji yang terdiri dari F Test (*Chow Test*), *Hausman Test* dan *Langrangge Multiplier* (LM) Test jika hasil regresi data panel menunjukkan CE dan FE. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam analisis hasil adalah pengangguran sebagai variabel terikat dan inflasi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel bebas. Hasil perhitungan dari data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel.

A. Deskripsi Wilayah

Berikut adalah deskripsi secara umum mengenai wilayah daerah penelitian yaitu Provinsi Jawa Tengah mengenai keadaan geografi, keadaan demografi, jumlah penduduk, keadaan ekonomi dan keadaan administrasi pemerintahan.

1. Keadaan Geografi

Provinsi Jawa Tengah memiliki lambang berbentuk Kendi Amerta (Cupu Manik) dengan bentuk dasar segi lima yang menjelaskan identitas Provinsi Jawa Tengah yang begitu istimewa dan kaya akan budaya. Didalamnya terdapat tulisan Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja (berjanji bekerja keras membangun bangsa dan negara) dan bentuk dasar segi lima yang melambangkan Pancasila. Candi Borobudur yang merupakan identitas Jawa Tengah, Gunung Kembar berarti persatuan antara rakyat dengan pemerintah daerah, laut dan gunung melambangkan hidup dan kehidupan, bambu runcing melambangkan simbol perjuangan dan bintang, padi dan kapas melambangkan masa depan rakyat Jawa Tengah menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(<https://id.wikipedia>).

Keadaan geografi Jawa Tengah berdasarkan letak astronomi antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (Termasuk Pulau Karimun Jawa). Berdasarkan posisi geografinya, Jawa Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia

Barat : Provinsi Jawa Barat

Timur : Provinsi Jawa Timur

Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: <http://soloraya.net> (2017)

Luas wilayah total Jawa Tengah 32.544,12 km² dengan wilayah terluas Kabupaten Cilacap yaitu 2.138,51 km² (6,57%) dan wilayah terkecil Kota Magelang dengan luas 18,12 km² (0,06%) dari wilayah total Jawa Tengah. Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten dan Kota yaitu 29 Kabupaten dan 6 Kota.

2. Kondisi Demografi

Berikut akan dijelaskan mengenai kondisi demografi Provinsi Jawa Tengah. Demografi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu mengenai jumlah dan perkembangan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Berdasarkan proyeksi penduduk Jawa Tengah tahun 2015 sebanyak 33.774,14 ribu jiwa yang terdiri atas 16.750,90 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 17.023,24 ribu jiwa penduduk perempuan. Secara keseluruhan pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan 0,15 % dari tahun 2014. Kepadatan penduduk tahun 2015 mencapai 1.038 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2015 mencapai 1.038 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Surakarta sebesar 11.634 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 475 jiwa/km².

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015(jiwa)

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Ranking
(1)	(2)	(3)	(5)
1	2011	32.643.612	5
2	2012	33.270.207	3
3	2013	33.264.339	4
4	2014	33.522.663	2
5	2015	33.774.149	1

Sumber: BPS Jawa Tengah (berbagai edisi)

Dari tabel 4.1 dapat terlihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2015 jumlah penduduk mengalami kenaikan yang sangat besar dari tahun sebelumnya sebesar 33.774.149 jiwa.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian Jawa Tengah tahun 2015 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu, 5,44 % sedangkan tahun 2014 sebesar 5,28 %. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor jasa perusahaan sebesar 9,72 % namun peranannya terhadap PDRB hanya 0,34 %. Sektor yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 3,34 %. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan sumbangan sebesar 15,53 % dengan pertumbuhan riil sebesar 5,60 %. PDRB menurut komponen pengeluaran, yang terbesar adalah pengeluaran rumahtangga yaitu 61,14 % dari total PDRB Jawa Tengah sebesar 619.996,41 milyar rupiah. Dari pengukuran harga konstan pengeluaran pemerintah naik 3,71 %. Penggunaan PDRB terbesar yaitu pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kenaikan 5,15 % dari tahun sebelumnya.

5. Keadaan Administrasi/ Pemerintahan

Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota terdiri dari 573 kecamatan dan 8.559 desa/ kelurahan. Jumlah anggota DPRD sebanyak 99 orang dengan dikuasai oleh Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 27 orang dengan tingkat pendidikan rata-rata S1 sebanyak 54 orang. Jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) seluruhnya pada tahun 2015 sebanyak 16.258 orang.

B. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-aktor yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Faktor yang diteliti antara lain:

1. Pengangguran

Pada tahun 2011 tingkat pengangguran sebesar 6,07% dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar 5,88% sehingga dapat dikatakan tinggi karena melebihi %tase pengangguran nasional 5,50 %. Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5.31% dan hal ini dapat dikatakan pengangguran berada pada titik sedang karena dibawah presentase pengangguran nasional. Dari tahun 2011-2015 rata-rata pengangguran terbesar yaitu pada Kabupaten Berebes dengan angka mencapai 8.99 % dan terendah pada Kabupaten Wonogiri sebesar 3,48 %.

Dilihat dari tingkat pengangguran nasional, pada tahun 2011 pengangguran nasional mencapai angka 8.46 % dan selalu menurun setiap tahunnya hingga tahun 2015 turun menjadi 5,81 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2011-2015 pengangguran Jawa Tengah berkurang 1,8 %, hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan belum berhasil menekan tingkat pengangguran. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan DI Yogyakarta, Jawa Tengah memiliki rata-rata tingkat pengangguran terbesar. Dari tahun 2011-2015 rata-rata pengangguran Jawa Tengah sebesar 5,90 %, Jawa Timur 4,49 % dan DI Yogyakarta sebesar 3,79 %. Untuk lebih jelasnya data disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pengangguran 35 Kabupaten dan Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (%)

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Cilacap	10.82	7.29	6.68	5.65	8.01	7.69
2	Kab. Banyumas	6.61	5.11	5.45	5.37	6.37	5.78
3	Kab. Purbalingga	5.10	5.02	5.63	5.13	4.84	5.14
4	Kab. Banjarnegara	4.97	3.69	4.16	4.06	5.05	4.39
5	Kab. Kebumen	4.73	3.58	3.52	3.25	4.14	3.84
6	Kab. Purworejo	5.30	3.20	5.15	5.10	4.01	4.55
7	Kab. Wonosobo	4.92	3.21	5.82	5.34	4.47	5.15
8	Kab. Magelang	6.83	4.38	6.13	7.45	5.16	5.99
9	Kab. Boyolali	5.81	4.43	5.44	4.95	2.03	4.53
10	Kab. Klaten	7.63	3.70	5.34	4.75	2.51	4.79
11	Kab. Sukoharjo	6.27	6.10	5.98	4.60	4.52	5.49
12	Kab. Wonogiri	3.82	3.46	3.61	3.45	3.07	3.48
13	Kab. Karanganyar	5.78	5.82	3.84	3.54	3.60	4.52
14	Kab. Sragen	8.43	5.88	5.63	6.04	4.51	6.10
15	Kab. Grobogan	5.33	4.20	6.10	4.25	5.22	5.02
16	Kab. Blora	6.90	4.75	8.23	4.30	4.68	5.37
17	Kab. Rembang	7.22	5.75	5.97	5.23	4.51	5.74
18	Kab. Pati	11.17	11.98	7.29	6.37	4.43	8.25
19	Kab. Kudus	8.32	5.89	8.07	5.03	5.04	6.47
20	Kab. Jepara	5.48	4.29	6.34	5.09	3.12	4.86
21	Kab. Demak	5.03	8.40	7.08	5.17	6.02	6.34
22	Kab. Semarang	6.16	4.87	3.90	4.38	2.57	4.38
23	Kab. Temanggung	3.54	3.39	4.87	3.19	1.50	3.30
24	Kab. Kendal	6.54	6.31	6.43	6.15	7.07	6.50
25	Kab. Batang	6.66	5.88	7.02	7.42	4.56	6.31
26	Kab. Pekalongan	6.91	5.08	4.78	6.03	5.10	5.58
27	Kab. Pemalang	7.37	4.85	6.48	7.44	6.53	6.53
28	Kab. Tegal	10.59	6.12	6.89	8.47	9.52	8.32
29	Kab. Brebes	11.08	8.22	9.61	9.53	6.49	8.99
30	Kota Magelang.	11.51	8.99	6.75	7.38	6.43	8.21
31	Kota Surakarta	7.70	6.29	7.22	6.16	4.53	6.38
32	Kota Salatiga	9.02	6.84	6.21	4.46	6.43	6.59
33	Kota Semarang	7.65	6.01	6.02	7.76	5.77	6.64
34	Kota Pekalongan	8.06	7.67	5.28	5.42	4.10	6.11
35	Kota Tegal	9,77	8.75	9.32	9.20	8.06	9.02
Jawa Tengah		6,07	5,88	5,57	5,45	5,31	206.35

Sumber: BPS Jawa Tengah (2017)

2. Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Data inflasi merupakan tolak ukur kestabilan perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi yang diperoleh dari Indeks Harga Konstan (IHK).

Inflasi di Jawa Tengah dalam tahun 5 selalu mengalami perubahan. Tahun 2011 inflasi Jawa Tengah sebesar 2.68% dan selalu mengalami kenaikan sampai pada tahun 2014 sebesar 8.22% tetapi mengalami penurunan yang sangat besar pada tahun 2015 sebesar 2.73%. Pada tahun 2011-2015 rata-rata inflasi terbesar pada Kabupaten Cilacap sebesar 6,27 % dan terendah pada Kota Tegal sebesar 4.03 %. Nilai inflasi masih dibawah inflasi nasional, tahun 2011 sebesar 3.79 % dan selalu mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 8.36 % tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 3.35 %.

Jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur dan DIY, Jawa Tengah memiliki inflasi terkecil. Tahun 2011 inflasi Jawa Timur sebesar 4.09 % dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 sebesar 7.77 % dan turun pada 2015 sebesar 3.08 %. Tahun 2011 inflasi DIY sebesar 3.88 % terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2014 sebesar 6,59 dan turun pada tahun 2015 sebesar 3.09 %. Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu ketika setiap daerah satu mengalami kenaikan maka daerah lain juga mengikuti perubahan dan sebaliknya ketika inflasi pada suatu daerah mengalami penurunan maka daerah lain juga mengalami perubahan inflasi.

Inflasi di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong sangat ringan karena tingkat inflasi sepanjang 5 tahun dibawah 100 % pertahun. Untuk lebih jelasnya mengenai data inflasi disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabal 4.3
Inflasi 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015 (%)

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Cilacap	5.27	6,87	8.37	8.19	2.63	6.27
2	Kab. Banyumas	3.40	4.73	8.50	7.09	2.52	5.25
3	Kab. Purbalingga	4.47	4.09	9.57	9.08	1.62	5.77
4	Kab. Banjarnegara	4.73	4.55	8.35	7.78	2.97	5.68
5	Kab. Kebumen	4.52	4.64	10.46	7.36	2.91	5.98
6	Kab. Purworejo	2.52	3.66	7.14	8.48	3.45	5.05
7	Kab. Wonosobo	2.66	3.84	8.82	8.44	2.71	5.29
8	Kab. Magelang	2.64	2.59	8.34	7.91	3.60	5.02
9	Kab. Boyolalai	3.35	3.45	8.21	7.45	2.58	5.01
10	Kab. Klaten	1.67	3.65	7.92	7.76	2.57	4.71
11	Kab. Sukoharjo	2.63	4.22	8.42	7.93	2.69	5.18
12	Kab. Wonogiri	3	3.43	8.60	7.20	2.13	4.87
13	Kab. Karanganyar	3.31	3.29	8.70	7.38	2.40	5.02
14	Kab. Sragen	2.86	3.74	7.55	8.51	3.05	5.14
15	Kab. Grobogan	1.86	4.48	7.88	8.03	3.31	5.11
16	Kab. Blora	2.26	3.55	7.94	7.13	2.85	4.75
17	Kab. Rembang	2.73	4.28	6.88	7.59	2.66	4.83
18	Kab. Pati	2.30	3.92	7.57	8.01	3.23	5.01
19	Kab. Kudus	3.34	4.77	8.31	8.59	3.28	5.66
20	Kab. Jepara	3.59	4.52	7.95	9.87	4.57	6.10
21	Kab. Demak	3.49	4.10	8.22	8.69	2.80	5.46
22	Kab. Semarang	3.29	4.56	8.11	8.63	2.85	5.49
23	Kab. Temanggung	2.42	4.73	7.01	7.81	2.74	4.94
24	Kab. Kendal	3.49	3.89	6.90	8.34	4.13	5.35
25	Kab. Batang	3.01	3.83	8.08	7.66	2.94	5.10
26	Kab. Pekalongan	2.65	2.96	8.18	8.32	3.42	5.11
27	Kab. Pemalang	2.80	4.04	6.52	7.38	3.52	4.85
28	Kab. Tegal	2.74	4.13	7.79	8.48	3.64	5.36
29	Kab. Brebes	3.09	4.61	9.83	6.20	3.08	5.36
30	Kota Magelang	4.15	0	7.79	7.92	2.70	4.51
31	Kota Surakarta	1.93	2.87	8.32	8.01	2.56	4.74
32	Kota Salatiga	2.84	4.12	7.67	7.84	2.61	5.02
33	Kota Semarang	2.87	0.41	8.19	8.53	2.56	4.51
34	Kota Pekalongan	2.45	3.55	7.40	7.82	3.46	4.94
35	Kota Tegal	2.58	0.40	5.80	7.40	3.95	4.03
Jawa Tengah		2.68	4.24	7.99	8.22	2.73	5.16

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (berbagai edisi)

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah merupakan suatu bayaran atau imbalan yang diberikan kepada pekerja oleh atasan/majikan. Jumlah upah minimum harus dapat memenuhi kebutuhan pekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Upah yang diberikan kepada pekerja merupakan hal yang sangat penting karena pekerja akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari upah yang akan diberikan.

Tabel 4.3 menunjukan UMK 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015. Selama tahun 2011-2015 rata-rata UMK tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada Kota Semarang sebesar Rp.1.220.820,00 dan rata-rata dengan UMK terendah adalah Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 888.533,00. Tetapi setiap tahunnya UMK Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan upah nasional Jawa Tengah jauh lebih kecil. Upah nasional tahun 2011 sebesar Rp.988.829,00 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2015 upah nasional mencapai Rp.1.790.342,00. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat upah Jawa Tengah masih sangat rendah.

Sebagai gambaran antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur dan DIY, Jawa Tengah memiliki UMK yang sangat rendah hal ini dapat dilihat dari rata-rata UMK Jawa Timur tahun 2012 sebesar Rp. 1.323.456,00 sedangkan DIY sebesar Rp.1.065.247,00. Untuk lebih jelas data disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Upah Minimum 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015 (ribu rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Cilacap	718.666	773.000	838.500	962.500	1.150.000	888.533
2	Kab. Banyumas	750.000	795.000	816.000	1.000.000	1.100.000	892.200
3	Kab. Purbalingga	765.000	818.500	896.500	1.023.000	1.101.600	920.920
4	Kab. Banjarnegara	766.000	765.000	835.000	920.000	1.112.500	879.700
5	Kab. Kebumen	767.000	770.000	835.000	975.000	1.157.500	900.900
6	Kab. Purworejo	768.000	809.000	849.000	910.000	1.165.000	900.200
7	Kab. Wonosobo	769.000	825.000	880.000	990.000	1.166.000	926.000
8	Kab. Magelang	770.000	870.000	942.000	1.152.000	1.255.000	997.800
9	Kab. Boyolali	771.000	836.000	895.000	1.116.000	1.197.800	963.160
10	Kab. Klaten	772.000	812.000	871.500	1.026.600	1.170.000	930.420
11	Kab. Sukoharjo	773.000	841.000	902.000	1.150.000	1.223.000	977.800
12	Kab. Wonogiri	774.000	775.000	902.000	954.000	1.101.000	901.200
13	Kab. Karanganyar	775.000	846.000	896.500	1.060.000	1.226.000	960.700
14	Kab. Sragen	776.000	810.000	864.000	960.000	1.105.000	903.000
15	Kab. Grobogan	777.000	785.000	842.000	935.000	1.160.000	899.800
16	Kab. Blora	778.000	855.500	932.000	1.009.000	1.180.000	950.900
17	Kab. Rembang	779.000	816.000	896.000	985.000	1.120.000	919.200
18	Kab. Pati	790.000	837.500	927.600	1.013.027	1.176.500	946.925
19	Kab. Kudus	781.000	889.000	990.000	1.150.000	1.380.000	1.038.000
20	Kab. Jepara	782.000	800.000	875.000	1.000.000	1.150.000	921.400
21	Kab. Demak	783.000	893.000	995.000	1.280.000	1.535.000	1.097.200
22	Kab. Semarang	784.000	941.000	1.051.000	1.208.200	1.419.000	1.080.760
23	Kab. Temanggung	785.000	866.000	940.000	1.050.000	1.178.000	963.800
24	Kab. Kendal	786.000	893.000	935.100	1.206.000	1.383.450	1.040.710
25	Kab. Batang	787.000	880.000	970.000	1.146.000	1.270.000	1.010.600
26	Kab. Pekalongan	788.000	873.000	962.000	1.145.000	1.271.000	1.007.800
27	Kab. Pemalang	789.000	793.000	908.000	1.066.000	1.193.400	949.880
28	Kab. Tegal	790.000	795.000	850.000	1.000.000	1.155.000	918.000
29	Kab. Brebes	791.000	775.000	859.000	1.000.000	1.166.550	918.310
30	Kota Magelang	792.000	837.000	901.500	1.037.000	1.211.000	955.700
31	Kota Surakarta	793.000	864.450	915.900	1.145.000	1.222.400	988.150
32	Kota Salatiga	794.000	901.396	974.000	1.170.000	1.287.000	1.025.279
33	Kota Semarang	795.000	991.500	1.209.100	1.423.500	1.685.000	1.220.820
34	Kota Pekalongan	765.000	895.500	980.000	1.165.000	1.291.000	1.025.500
35	Kota Tegal	797.000	795.000	860.000	1.044.000	1.206.000	940.400
Jawa Tengah		778.833	837.798	914.276	1.067.909	1.224.532	964.619

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (berbagai edisi)

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah pada waktu tertentu. Badan Pusat Statistik (BPS), dalam konsepnya menggunakan 2 perhitungan PDRB yaitu, PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Pada penelitian ini digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena harga dianggap tidak berubah. BPS dalam penghitungannya telah menggunakan perubahan dasar tahun 2000 menjadi tahun dasar 2010. Perubahan tersebut dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir banyak terjadi perubahan dari semua aspek yang mempengaruhi perekonomian nasional PDRB tahun dasar 2010, sehingga PDRB menurut lapangan usaha sekarang dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha dari yang sebelumnya 9 lapangan usaha.

Tabel 4.4 menunjukkan nilai PDRB pada 35 kabupaten di Jawa Tengah atas dasar konstan tahun 2011-2015. Tahun 2011-2015, Kota Semarang menjadi daerah dengan PDRB tertinggi dan terendah Kota Semarang. Selain sebagai pusat kota Kota Semarang memiliki daya tarik yang sangat besar dalam menjalankan perekonomian lebih dari daerah lainya di Jawa Tengah. Kota Magelang menjadi daerah dengan nilai PDRB terendah setiap tahunnya, hal ini dikarenakan Kota Magelang adalah daerah yang mempunyai luas wilayah terkecil (18,12 km²) di Jawa Tengah sehingga laju perekonomian terbatas.

Sebagai gambaran perbandingan dilihat dari rata-rata nasional, Jawa Tengah memiliki PDRB terkecil jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan DIY. Pada tahun 2011 rata-rata nasional berada pada rasio 6.16 persen, Jawa Tengah sebesar 5.30, Jawa Timur sebesar 6.44 dan DIY sebesar 5.2 persen. Tahun 2014 rata-rata nasional berada pada rasio 5,21 persen, Jawa Tengah 5.42 persen, Jawa Timur 5.86 persen dan DIY sebesar 5.18 persen. Sehingga dapat disimpulkan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, PDRB Jawa Tengah cenderung meningkat setiap tahunnya karena berada dari rata-rata nasional sehingga hal tersebut menunjukkan meningkatnya kesejahteraan Jawa Tengah.

Tetapi jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan DIY, Jawa Tengah memiliki rata-rata PDRB terendah. Untuk lebih jelasnya data disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabal 4.5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015(milyar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	Tingkat Pertumbuhan(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Cilacap	78.156	79.702	81.022	83.393	88.777	3.42
2	Kab. Banyumas	24.538	25.982	27.793	29.368	31.164	6.25
3	Kab. Purbalingga	11.474	12.138	12.778	13.526	14.255	5.60
4	Kab. Banjarnegara	9.952	10.473	11.043	11.625	12.262	5.37
5	Kab. Kebumen	13.068	13.707	14.333	15.164	16.118	5.54
6	Kab. Purworejo	8.993	9.406	9.871	10.313	10.841	4.95
7	Kab. Wonosobo	9.489	9.935	10.334	10.839	11.394	4.82
8	Kab. Mgehang	15.323	16.071	17.021	17.851	18.805	5.54
9	Kab. Boyolali	14.592	15.369	16.267	17.147	18.189	5.80
10	Kab. Klaten	18.071	19.102	20.241	21.414	22.622	5.88
11	Kab. Sukoharjo	17.319	18.342	19.402	20.448	21.612	5.73
12	Kab. Wonogiri	13.786	14.605	15.303	16.114	16.975	4.99
13	Kab. Karanganyar	17.205	18.219	19.257	20.261	21.284	5.36
14	Kab. Sragen	16.870	17.902	19.102	20.169	21.388	6.20
15	Kab. Grobogan	16.870	13.842	14.475	15.064	15.962	4.57
16	Kab. Blora	10.597	11.117	11.713	12.227	12.882	4.89
17	Kab. Rembang	8.808	9.277	9.781	10.283	10.848	5.31
18	Kab. Pati	19.893	21.072	22.329	23.363	24.760	5.68
19	Kab. Kudus	55.175	57.441	59.944	62.626	65.183	4.25
20	Kab. Jepara	14.004	14.825	15.624	16.374	17.197	5.20
21	Kab. Demak	12.275	12.823	13.499	14.078	14.913	5.07
22	Kab. Semarang	22.925	24.307	25.758	27.262	28.743	5.91
23	Kab. Temanggung	10.301	10.741	11.299	11.870	12.484	5.16
24	Kab. Kendal	20.032	21.076	22.386	23.543	24.760	5.67
25	Kab. Batang	10.025	10.488	11.104	11.707	12.362	5.53
26	Kab. Pekalongan	10.834	11.354	12.034	12.630	13.233	5.24
27	Kab. Pemalang	11.847	12.477	13.172	13.900	14.664	5.38
28	Kab. Tegal	16.071	16.912	18.050	18.958	19.990	5.77
29	Kab. Brebes	21.498	22.482	23.812	25.073	26.570	5.68
30	Kota Magelang	4.255	4.842	4.755	4.988	5.240	5.50
31	Kota Surakarta	22.848	24.123	25.631	26.984	28.453	5.80
32	Kota Salatiga	6.230	6.574	6.989	7.376	7.755	5.82
33	Kota Semarang	86.142	91.282	96.985	103.176	109.141	6.19
34	Kota Pekalongan	4.878	5.151	5.456	5.755	6.043	5.50
35	Kota Tegal	7.341	7.650	8.084	8.491	8.951	5.36
Jawa Tengah		658.003	690.461	726.652	763.369	805.839	5.27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (berbagai edisi)

C. Hasil Analisis Data

1. Pembuatan Model Regresi Data Panel

Estimasi (pembuatan) model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa model, antara lain: Model *Common Effect* (CE), *Fixed Effect* (FE) dan *Random Effect* (RE).

a. Hasil Model *Common Effect* (CE)

Tabel 4.6
Hasil Model *Common Effect* (CE)

No	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	C	8.490915	0.771222	11.00969	0.0000
2	INFLASI	-0.043409	0.054901	-0.790686	0.4302
4	UPAH	-2.89E-06	7.68E-07	-3.761148	0.0002
5	PDRB	2.00E-08	7.18E-09	2.779932	0.0060
R-squared		0.099163	Mean dependent var		5.895714
Adjusted R-squared		0.083359	S.D. dependent var		1.887976
S.E. of regression		1.807575	Akaike info criterion		4.044441
Sum squared resid		558.7127	Schwarz criterion		4.116779
Log likelihood		-349.8886	Hannan-Quinn criter.		4.073783
F-statistic		6.274465	Durbin-Watson stat		0.920190
Prob(F-statistic)		0.000459			

Sumber: Data Olahan Eviews 9

Tabel 4.6 menunjukkan, pada model regresi CE secara parsial variabel inflasi memiliki nilai tidak signifikan (-0.043) terhadap tingkat pengangguran dengan probabilitas (0,430), variabel upah memiliki nilai negatif (-2.89E) dan signifikan terhadap pengangguran (0.000) dan variabel PDRB memiliki nilai positif (2.00) dan signifikan terhadap pengangguran (2.00). Sedangkan secara

bersama-sama semua variabel bebas memiliki nilai signifikan terhadap pengangguran (0.000)

b. Hasil Regresi Model Fixed Effect (FE)

Tabel 4.7
Hasil Model Fixed Effect (FE)

No	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	C	9.115401	1.009336	9.031091	0.0000
2	INFLASI	-0.008407	0.037447	-0.224509	0.8227
3	UPAH	-3.23E-06	8.93E-07	-3.613303	0.0004
4	PDRB	-2.99E-09	7.49E-08	-0.039868	0.9683
Effects Specification					
Cross-section fixed (dummy variables)					
	R-squared	0.681333	Mean dependent var		5.895714
	Adjusted R-squared	0.595269	S.D. dependent var		1.887976
	S.E. of regression	1.201101	Akaike info criterion		3.393835
	Sum squared resid	197.6422	Schwarz criterion		4.081046
	Log likelihood	-258.9606	Hannan-Quinn criter.		3.672587
	F-statistic	7.916637	Durbin-Watson stat		2.146946
	Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Olahan Eviews 9

Tabel 4.7 menunjukkan, regresi model Fixed Effect (FE) secara parsial inflsi berpengaruh negati(-0.008407) dan tidak signifikan (0.8227) terhadap pengangguran. Upah berpengaruh negatif (-3.23E-06) dan signifikan (0.0004) terhadap penanggurandan PDRB berpengaruh negatif (-2.99E-09) dan tidak signifikan (0.9683) terhadap pengangguran. Sedangkan secara bersama-sama

semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap pengangguran (0.000000).

c. Hasil Regresi Random Effect (RE)

Tabel 4.8
Hasil Regresi Random Effect (RE)

No	T Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
a ¹	C	8.795881	0.598054	14.70750	0.0000
2	INFLASI	-0.014742	0.037056	-0.397844	0.6912
b ³	UPAH	-3.36E-06	5.53E-07	-6.065094	0.0000
4	PDRB	1.99E-08	1.26E-08	1.574517	0.1172
e	Weighted Statistics				
1	R-squared	0.179331	Mean dependent var		2.179476
	Adjusted R-squared	0.164933	S.D. dependent var		1.316345
	S.E. of regression	1.202902	Sum squared resid		247.4325
S	F-statistic	12.45551	Durbin-Watson stat		1.769221
	Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Olahan Eviews 9

Tabel 4.8 menunjukkan, pada model RE secara parsial inflasi berpengaruh negatif (-0.014742) dan tidak signifikan (0.6912) terhadap pengangguran, upah berpengaruh negatif (-3.36E-06) dan signifikan (0.0000) terhadap pengangguran dan PDRB berpengaruh positif (1.99E-08) dan tidak signifikan (0.1172) terhadap pengangguran. Sedangkan secara bersama-sama semua variabel bebas berpengaruh signifikan (0.000000) terhadap pengangguran.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penentuan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pengujian, antara lain: F Test (Chow Test), Hausman Test dan Lagrange Multiplier Tests.

a. Hasil F Test (Chow Test) untuk membandingkan CE dan FE

Tabel 4.9
Hasil Uji F Test (Chow Test)

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)
Cross-section F	7.361294	(34,137)	0.0000
Cross-section Chi-square	181.856029	34	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9

Tabel 4.9 menunjukkan, hasil Uji Chow Test dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Cross Section F sebesar 0.0000 yang nilainya $<0,05$ sehingga pada Uji Chow Test dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibandingkan dengan model CE.

b. Hasil Hausman Test untuk membandingkan model FE dan RE

Tabel 4.10
Hasil Uji Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)
Cross-section random	3.513297	3	0.3190

Sumber: Data Olahan Eviews 9

Tabel 4.10 menunjukkan, hasil dari Uji Hausman Test dapat disimpulkan bahwa nilai Prob. Cross Section Random sebesar 0.3190 yang

artinya nilai Prob. Cross Section Random $>0,05$ sehingga pada Uji Hausman model RE lebih tepat di bandingkan dengan model FE.

c. Hasil Uji Langrangge Multiplier (LM)) Test untuk membandingkan model CE dan RE

Tabel 4.11
Hasil Uji Langrangge Multiplier (LM) Test

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	106.6126 (0.0000)	1.652031 (0.1987)	108.2646 (0.0000)
Honda	10.32534 (0.0000)	1.285314 (0.0993)	8.209971 (0.0000)
King-Wu	10.32534 (0.0000)	1.285314 (0.0993)	4.565767 (0.0000)
Standardized Honda	10.64271 (0.0000)	3.240867 (0.0006)	5.469618 (0.0000)
Standardized King-Wu	10.64271 (0.0000)	3.240867 (0.0006)	3.478392 (0.0003)
Gourieriou, et al.*	--	--	108.2646 (< 0.01)

Tabel 4.11 menunjukkan, hasil dari LM Test dapat di simpulkan bahwa nilai Prob. Cross Section Random sebesar 0.0000 yang artinya nilai Prob. Cross Section Random $<0,05$ sehingga pada Uji LM model RE lebih tepat di bandingkan dengan model CE. Dengan melihat ketiga uji pemilihan model yaitu Uji F Test (Chow Test), Hausmn Test dan LM Test dapat disimpulkan bahwa

model Random Effects (RE) lebih baik dari model Common Effect (CE) dan Fixed Effect (FE). Dengan begitu tidak perlu dilakukan Uji Heteroskedastisitas di karenakan CE dan FE masih menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) sedangkan RE sudah menggunakan *Generalize Least Square* (GLS) yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi.

D. Interpretasi Hasil Secara Ekonomi

1. Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran

Hasil regresi Random Effect (RE) menunjukkan nilai inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi tidak mempengaruhi pengangguran. Hasil ini tentu berbeda dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pengangguran. Tingginya tingkat inflasi sebagai cerminan tingkat agregat akan mendorong tingkat produksi. Perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dilakukan penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Agustin dan Rusmisi (2012) penelitian tentang pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran di Indonesia periode 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tidak berpengaruhnya inflasi terhadap pengangguran karena terjadi desakan

biaya (*cost push inflation*) yang sangat memberatkan pengusaha sehingga mengurangi pemakaian tenaga kerja untuk mengurangi ongkos produksi. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak signifikan maka tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan dan perubahan pengangguran bukan karena pengaruh dari inflasi.

2. Pengaruh Upah terhadap Pengangguran

Hasil regresi Random Effect (RE) menunjukkan nilai UMK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien sebesar -0.000003 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan tingkat upah sebesar 1000 rupiah, maka akan menyebabkan menurunnya pengangguran sebesar 0.000003. Hal ini bertentangan pada pendapat Gilarso (2003) yang menyatakan jika upah mengalami kenaikan maka dapat mempengaruhi peningkatan biaya produksi, yang akan memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja dan memberi dampak yang negatif yaitu penambahan angka pengangguran.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan Ma'arif Ridho Setyawan (2016) yang meneliti mengenai analisis yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1991-2015. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam fenomena ekonomi. Naiknya tingkat

upah dapat pula mengurangi pengangguran, jika naiknya upah tersebut disebabkan karena pertumbuhan ekonomi. Maka dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa naiknya tingkat upah yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi terhadap penurunan tingkat pengangguran.

Menurut Umar(2013), semakin banyak sertifikasi kompetensi yang dimiliki seorang pekerja atau buruh yang dibarengi dengan semakin tingginya produktivitas yang dihasilkan serta semakin baiknya hasil kerja yang dilakukan maka secara langsung akan mempengaruhi besarnya upah (salary). Naiknya tingkat upah dapat mendorong pengangguran mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, hal-hal yang dapat meningkatkan upah yaitu dengan lebih banyak meningkatkan pelatihan-pelatihan sebagai bentuk peningkatan SDM agar suatu perusahaan dapat memberikan pekerjaan karena tentunya pelaku usaha sangat membutuhkan tenaga profesional untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena dengan meningkatnya SDM maka dapat mengembangkan suatu perusahaan sehingga pendapatan dalam perusahaan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan maka akan meningkatkan upah sehingga pengangguran akan berkurang.

3. Pengaruh PDRB terhadap Pengangguran

Hasil regresi menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap besarnya pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini dapat dilihat dari hasil koefisien 1,99 dengan probabilitas 0,11 pada derajat 0.05% yang berarti PDRB tidak mempengaruhi pengangguran Provinsi Jawa Tengah. Alasannya pertumbuhan PDRB belum bisa menciptakan tenaga kerja untuk pengangguran. Hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesis yang dijelaskan dengan hukum Okun, hukum okun merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan PDB riil yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 % dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan pada PDB riil yang mendekati 2 % (Mankiw, 2006). Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Riko Anggara (2016) yang menunjukkan hasil penelitian PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis faktor-faktor pengaruh variabel makroekonomi terhadap pengangguran di Kabupaten / Kota Jawa Tengah tahun 2011-2015, dapat dituliskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel inflasi dan PDRB tidak signifikan terhadap pengangguran. Sehingga inflasi dan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya pengangguran.
2. Variabel upah mempengaruhi tingkat pengangguran dan memiliki hubungan yang negatif, artinya ketika upah bertambah maka pengangguran akan berkurang. Hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah upah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Selain itu karena kenaikan upah mendorong pengangguran untuk mencari pekerjaan yang dengan upah tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang dapat meningkatkan upah yaitu dengan mengikuti banyak pelatihan-pelatihan sehingga meningkatkan SDM. Ketika SDM seseorang tinggi maka kemampuan untuk menghasilkan kinerja juga akan tinggi sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar dan upah menjadi meningkat.

3. Teori Kurva Phillips tidak berlaku di Indonesia karena inflasi di Indonesia tidak disebabkan oleh permintaan agregat melainkan permintaan harga.

B. SARAN

1. Dengan tingkat upah yang masih rendah pada Provinsi Jawa Tengah maka seharusnya pemerintah lebih meningkatkan pelatihan-pelatihan kerja untuk masyarakat. Masyarakat akan memiliki kemampuan yang tinggi dan akan dihargai oleh upah yang besar atas kinerjanya oleh perusahaan.
2. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa PDRB di Provinsi Jawa Tengah belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk pengangguran. Oleh sebab itu pemerintah daerah seharusnya lebih memanfaatkan sumber-sumber daerah yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
3. Seharusnya perusahaan Indonesia lebih menerapkan padat karya dibanding padat modal agar pertumbuhan lapangan kerja lebih besar dibandingkan angkatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. 2007. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penangguran di Inonesia. Jurnal Inflasi dan Pengangguran Vol.1 no.1, 2007, Jambi.
- Arsyad, Azhar . 2010. Media Pembelajaran. PT Raja grafindo Persada. Jakarta
- Bellente dan Jackson. 1983. Ekonomi Ketenagakerjaan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok
- Boediono. 1985. Ekonomi Makro. BPFE. Yogyakarta
- Boediono. 2000. Ekonomi Moneter Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta
- Dornbusch, Rudiger, Fischer, Stanley dan Startz, Richard.2008. Makroekonomi. PT Media Global Edukasi. Jakarta
- Gilarso, T. 2003. Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro. Kanisius. Jakarta
- Gilarso, J. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Edisi. Revisi. Kanisius. Yogyakarta
- Umar, Kasim. 2013. Faktor-Faktor yang Dapat Menentukan Besar Kecilnya Upah. www.hukumonline.com/klinik/detail/1t51b57c1733caf/faktor-faktor-yang-dapat-menentukanbesar-kecilnya-upah. di akses senin, 19 juni 2017
- Kaufman, E Bruce dan Julie, L Hotckiss. 1999. The Economics Of Labor Markets. BPFE UGM. Yogyakarta
- Lipsey,G Richard. Steiner, O Peter. Pourvis, D Douglas.1992. Pengantar Makroekonomi Edisi Kedelapan. Erlangga. Jakarta
- Mankiw, N.Gregory. 2000. Teori Makro Ekonomi Edisis Keempat. Erlangga. Jakarta
- Mankiw, N. Gregory. 2007. Teori Makro Ekonomi Edisis Keenam. Erlangga. Jakarta
- Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nanga, Muana. 2005. Makroekonomi: Teori dan Masalah Kebijakan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sadono, Sukirno. 1994. Teori dan Pengantar Makroekonomi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sadono, Sukirno. 2006. Teori dan Pengantar Makroekonomi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Simanjuntak, K Payman. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. FEUI. Jakarta
- Samuelson, S Paul dan Nordhaus. 2001. Makroekonomi Edisi Keempatbelas. Erlangga. Jakarta
- Sarwono, Jonathan dan N Hendra. 2014. Eviews Cara Operasi dan Prosedur Analisis. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Simanjuntak, J Payman. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. LPFEUI. Jakarta
- Susanti, Hera. 2000. Indikator-Indikator Makro Ekonomi. LPFE Universitas IndonesiaI. Jakarta
- Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Swasono, E Sri. 1987. Strategi-Strategi Pembangunan. Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Tarigan, S. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bhumi Aksara, Jakarta
- Teor, Pramudya Ananta. 1999. Kronik Revolusi Indonesia. Keperpustakaan Populer Gramedia. Jakarta
- Todaro, M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta
- Widarjono, Agus. 2007. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Kedua. FE Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

SITUS RESMI

- <http://www.bps.RI.go.id> (Situs Resmi Badan pusat Statistik Indonesia)
- <http://www.bps.Jawa Tengah.go.id> (Situs Resmi Badan pusat Statistik Jawa Tengah)
- <http://www.bps.Jawa.Timur.go.id> (Situs Resmi Badan pusat Statistik Jawa Timur)
- <http://www.bps.DIY.go.id> (Situs Resmi Badan pusat Statistik DIY)
- <http://www.bi.go.id> (Situs Resmi Bank Indonesia)
- <http://www.bapennas.go.id> (Situs Resmi Badan Perencana Pembangunan Nasional)
- http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf (Undang-Undang Ketengakerjaan)
- <https://www.google.co.id/PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor78> (pengupahan)

<http://dosen.perbanas.id/wp-content/uploads/2015/01/Operasionalisasi-Regresi-Data-Panel.pdf> (Analisis Data Panel)

https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_Jawa_Tengah (Lambang Jawa Tengah)

file:///C:/Users/toshiba/Downloads/PP_NO_78_2015.PDF/upah (PP Upah)

<https://kemenkeu.go.id/Berita/laju-inflasi-sepanjang-tahun-2011-terkendali/> (Inflasi Nasional)

PERATURAN PERUNDANGAN :

Permenakertrans No.1 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan

LAMPIRAN

JUMLAH PENDUDUK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015

WILAYAH JATENG	JUMLAH PENDUDUK				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	1651940	1679864	1676089	1685573	169473
Kabupaten Banyumas	1570598	1603037	1605579	1620918	163591
Kabupaten Purbalingga	858798	877489	879880	889214	89838
Kabupaten Banjarnegara	875214	890962	889921	895986	90183
Kabupaten Kebumen	1162294	1181678	1176722	1181006	118488
Kabupaten Purworejo	696141	708483	705483	708038	71039
Kabupaten Wonosobo	758993	771447	769318	773280	77712
Kabupaten Magelang	1194353	1219371	1221681	1233695	124550
Kabupaten Boyolali	936822	953317	951817	957857	96369
Kabupaten Klaten	1135201	1153047	1148994	1154040	115880
Kabupaten Sukoharjo	832094	848718	849506	856937	86421
Kabupaten Wonogiri	929870	946373	942377	945817	94902
Kabupaten Karanganyar	821694	838762	840171	848255	85620
Kabupaten Sragen	861939	875283	871989	875600	87903
Kabupaten Grobogan	1316693	1339127	1336304	1343960	135143
Kabupaten Blora	833786	847125	844444	848369	85211
Kabupaten Rembang	596801	608548	608903	614087	61917
Kabupaten Pati	1198935	1219371	1218016	1225594	123289
Kabupaten Kudus	788264	807555	810810	821136	83130
Kabupaten Jepara	1115688	1144916	1153213	1170797	118829
Kabupaten Demak	1067993	1091379	1094472	1106328	111791
Kabupaten Semarang	944877	968383	974092	987557	100089
Kabupaten Temanggung	715907	730720	731911	738915	74583
Kabupaten Kendal	908533	926325	926812	934643	94228
Kabupaten Batang	713942	728578	729616	736393	74309
Kabupaten Pekalongan	845471	861366	861082	736393	87399
Kabupaten Pemalang	1264535	1285024	1279596	1284236	128858
Kabupaten Tegal	1399789	1421001	1415009	1420132	142489
Kabupaten Brebes	1742528	1770480	1764648	1773379	178138
Kota Magelang	118606	120447	119935	120373	12079
Kota Surakarta	501650	509576	507825	510077	51223
Kota Salatiga	173056	177480	178594	181193	18382
Kota Semarang	1585417	1629924	1644800	1672999	170111
Kota Pekalongan	284413	290347	290870	293704	29640
Kota Tegal	240777	244632	243860	244998	24612
JUMLAH TOTAL	32.643.612	33.270.207	33.264.339	33.522.663	33.774.149

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) 35
Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Persen)

KABUPATEN / KOTA		2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
Kabupaten							
1	Cilacap	4,07	1,98	1,66	2,93	6,46	3,42
2	Banyumas	6,61	5,88	6,97	5,67	6,12	6,25
3	Purbalingga	5,67	5,79	5,27	5,86	5,39	5,60
4	Banjarnegara	5,44	5,23	5,44	5,27	5,48	5,37
5	Kebumen	6,15	4,88	4,57	5,80	6,29	5,54
6	Purworejo	5,64	4,59	4,94	4,49	5,12	4,95
7	Wonosobo	5,37	4,70	4,00	4,89	5,12	4,82
8	Magelang	6,68	4,88	5,91	4,88	5,35	5,54
9	Boyolali	6,34	5,33	5,83	5,42	6,08	5,80
10	Klaten	6,29	5,71	5,96	5,79	5,64	5,88
11	Sukoharjo	5,88	5,90	5,78	5,40	5,69	5,73
12	Wonogiri	3,58	5,94	4,78	5,30	5,34	4,99
13	Karanganyar	4,95	5,90	5,69	5,22	5,05	5,36
14	Sragen	6,55	6,12	6,70	5,58	6,05	6,20
15	Grobogan	3,19	5,08	4,57	4,07	5,96	4,57
16	Blora	4,42	4,90	5,36	4,39	5,36	4,89
17	Rembang	5,19	5,32	5,43	5,14	5,49	5,31
18	Pati	5,91	5,93	5,97	4,63	5,98	5,68
19	Kudus	4,24	4,11	4,36	4,47	4,08	4,25
20	Jepara	4,92	5,86	5,39	4,80	5,03	5,20
21	Demak	5,39	4,46	5,27	4,29	5,93	5,07
22	Semarang	6,27	6,03	5,97	5,84	5,43	5,91
23	Temanggung	6,09	4,27	5,20	5,06	5,17	5,16
24	Kendal	6,57	5,21	6,22	5,17	5,17	5,67
25	Batang	6,12	4,62	5,88	5,43	5,60	5,53
26	Pekalongan	5,66	4,81	5,99	4,95	4,78	5,24
27	Pemalang	5,01	5,32	5,57	5,53	5,50	5,38
28	Tegal	6,39	5,23	6,73	5,03	5,45	5,77
29	Brebes	6,65	4,58	5,91	5,30	5,97	5,68
Kota							0,00
1	Magelang	6,11	5,37	6,04	4,90	5,07	5,50
2	Surakarta	6,42	5,58	6,25	5,28	5,44	5,80
3	Salatiga	6,58	5,53	6,30	5,54	5,14	5,82
4	Semarang	6,58	5,97	6,25	6,38	5,79	6,19
5	Pekalongan	5,49	5,61	5,91	5,48	5,00	5,50
6	Tegal	6,47	4,21	5,67	5,03	5,43	5,36
KABUPATEN / KOTA		5,58	4,93	5,24	5,05	5,56	5,27

**Upah Minimum Provinsi Indonesia
Tahun 2011-2015**

Provinsi	UMP INDONESIA (rupiah)				
	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	1350000	1400000	1550000	1750000	1900000
SUMATERA UTARA	1035500	1200000	1375000	1505850	1625000
SUMATERA BARAT	1055000	1150000	1350000	1490000	1615000
RIAU	1120000	1238000	1400000	1700000	1878000
JAMBI	1028000	1142500	1300000	1502300	1710000
SUMATERA SELATAN	1048440	1195220	1630000	1825000	1974346
BENGKULU	815000	930000	1200000	1350000	1500000
LAMPUNG	855000	975000	1150000	1399037	1581000
KEP. BANGKA BELITUNG	1024000	1110000	1265000	1640000	2100000
KEP. RIAU	975000	1015000	1365087	1665000	1954000
DKI JAKARTA	1290000	1529150	2200000	2441000	2700000
JAWA BARAT	732000	780000	850000	1000000	1000000
JAWA TENGAH	675000	765000	830000	910000	910000
DI YOGYAKARTA	808000	892660	947114	988500	988500
JAWA TIMUR	705000	745000	866250	1000000	1000000
BANTEN	1000000	1042000	1170000	1325000	1600000
BALI	890000	967500	1181000	1542600	1621172
NUSA TENGGARA BARAT	950000	1000000	1100000	1210000	1330000
NUSA TENGGARA TIMUR	850000	925000	1010000	1150000	1250000
KALIMANTAN BARAT	802500	900000	1060000	1380000	1560000
KALIMANTAN TENGAH	1134580	1327459	1553127	1723970	1896367
KALIMANTAN SELATAN	1126000	1225000	1337500	1620000	1870000
KALIMANTAN TIMUR	1084000	1177000	1752073	1886315	2026126
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	2026126
SULAWESI UTARA	1050000	1250000	1550000	1900000	2150000
SULAWESI TENGAH	827500	885000	995000	1250000	1500000
SULAWESI SELATAN	1100000	1200000	1440000	1800000	2000000
SULAWESI TENGGARA	930000	1032300	1125207	1400000	1652000

GORONTALO	762500	837500	1175000	1325000	1600000
SULAWESI BARAT	1006000	1127000	1165000	1400000	1655500
MALUKU	900000	975000	1275000	1415000	1650000
MALUKU UTARA	889350	960498	1200622	1440746	1577617
PAPUA BARAT	1210000	1410000	1450000	1720000	1870000
PAPUA	1316500	1403000	1585000	1710000	2040000
INDONESIA	908824	988829	1088903	1296908	1584391

**Perbandingan Inflasi DIY dengan Inflasi Nasional
Tahun 2007-2015**

Tahun/ Year	Kota Yogyakarta/ YogyakartaCity	
	Inflasi/ Inflation	Inflasi/ Inflation
2015	3,09	3,35
2014	6,59	8,36
2013	7,32	8,38
2012	4,31	4.30
2011	3,88	3,79
2010	7,38	6,96
2009	2,93	2,78
2008	9,88	11,06
2007	7,99	6,59

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi
Tahun 2011-2015**

Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	9,00	9,06	10,12	9,02	9,93
Sumatera Utara	8,18	6,28	6,45	6,23	6,71
Sumatera Barat	8,02	6,65	7,02	6,50	6,89
Riau	6,09	4,37	5,48	6,56	7,83
Jambi	4,63	3,20	4,76	5,08	4,34
Sumatera Selatan	6,60	5,66	4,84	4,96	6,07
Bengkulu	3,46	3,62	4,61	3,47	4,91
Lampung	6,38	5,20	5,69	4,79	5,14
Kepulauan Bangka Belitung	3,86	3,43	3,65	5,14	6,29
Kepulauan Riau	5,38	5,08	5,63	6,69	6,20
DKI Jakarta	11,69	9,67	8,63	8,47	7,23
Jawa Barat	9,96	9,08	9,16	8,45	8,72
Jawa Tengah	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99
DI Yogyakarta	4,39	3,90	3,24	3,33	4,07
Jawa Timur	5,38	4,11	4,30	4,19	4,47
Banten	13,74	9,94	9,54	9,07	9,55
Bali	2,95	2,10	1,83	1,90	1,99
Nusa Tenggara Barat	5,25	5,23	5,30	5,75	5,69
Nusa Tenggara Timur	3,11	3,04	3,25	3,26	3,83
Kalimantan Barat	4,60	3,54	3,99	4,04	5,15
Kalimantan Tengah	3,54	3,14	3,00	3,24	4,54
Kalimantan Selatan	6,29	5,19	3,66	3,80	4,92
Kalimantan Timur	11,43	9,02	7,95	7,38	7,50
Kalimantan Utara	-	-	-	-	5,68
Sulawesi Utara	10,10	7,98	6,79	7,54	9,03
Sulawesi Tengah	6,78	3,95	4,19	3,68	4,10
Sulawesi Selatan	8,13	6,01	5,10	5,08	5,95
Sulawesi Tenggara	4,69	4,14	4,38	4,43	5,55
Gorontalo	6,74	4,47	4,15	4,18	4,65
Sulawesi Barat	3,35	2,16	2,35	2,08	3,35
Maluku	10,81	7,71	9,91	10,51	9,93
Maluku Utara	5,34	4,82	3,80	5,29	6,05
Papua Barat	6,73	5,42	4,40	5,02	8,08
Papua	5,02	3,71	3,15	3,44	3,99
Indonesia	7,48	6,13	6,17	5,94	6,18